

BAB. II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan regional maupun nasional, merupakan upaya berkelanjutan menuju perubahan yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas manusia khususnya masyarakat Kota Sawahlunto sesuai potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global.

Perencanaan pembangunan jangka panjang didasarkan pada analisis terhadap kondisi awal perencanaan, kajian atas tantangan yang akan dihadapi selama jangka waktu perencanaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. KARAKTERISTIK WILAYAH

Kota Sawahlunto di kenal sebagai kota tambang dengan luas wilayah sebesar 27.345 ha atau 273,45 km², secara administrasi terdiri dari 4 kecamatan, 10 kelurahan dan 27 desa.

Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Silungkang dengan luas 32.93 km² sedangkan kecamatan terluas adalah Kecamatan Talawi dengan luas 99.39 km², untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah administrasi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.1
LUAS WILAYAH KOTA MENURUT KECAMATAN

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
Kecamatan Silungkang	32,93
Kecamatan Lembah Segar	52,58
Kecamatan Barangin	88,55
Kecamatan Talawi	99,39
Jumlah	273.45

Sumber: BPS Tahun 2012

Secara Geografis Kota Sawahlunto berada pada posisi koordinat antara 100.41 dan 100.49 Bujur Timur, 0.34 - 0.46 Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Solok
- Sebelah Timur : dengan Kabupaten Sijunjung
- Sebelah Barat : dengan Kabupaten Solok.

2.1.2. POTENSI PENGGUNAAN LAHAN

2.1.2.1. Topografi dan Morfologi

Secara topografi wilayah Kota Sawahlunto terletak di perbukitan dengan ketinggian antara 250-650 meter dari permukaan laut, terbentang dari utara ke selatan. Bagian timur dan selatan memiliki topografi yang relative curam dengan kemiringan lebih dari 40%, yang keseluruhan luasnya mencapai 28,52% dari luas wilayah kota, sedangkan bagian utara bergelombang dan relatif datar. Permukiman perkotaan hanya dijumpai di Kecamatan Talawi, Pusat Kota Lama dan sebagian wilayah Kecamatan Barangin, yang wilayahnya relatif datar dengan total luas 18% dari luas wilayah. Selengkapnya kelerengan lahan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.2
KELERENGAN LAHAN DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2013

Kecamatan	Luas Lahan Dengan Kelerengan (Ha)					Jumlah (Ha)
	0 – 2%	2 – 15%	15 – 25%	25 – 40%	> 40%	
Talawi	991	1.420	2.680	3.195	1.653	9.939
Barangin	343	1.514	1.432	3.450	2.136	8.855
Lb. Segar	240	358	694	1.836	2.110	5.258
Silungkang	29	288	735	340	1.901	3.293
Jumlah	1.603	3.580	5.541	8.821	7.800	27.345

Sumber: BPN Kota Sawahlunto

2.1.2.2. Geologi dan Jenis Tanah

Kota Sawahlunto terletak di atas Formasi Sawahlunto, batuan yang terbentuk pada zaman yang diberi istilah kala (epoch) Eocen sekitar 40 – 60 juta tahun yang lalu, serta berada di cekungan pra-tersier Ombilin yang berbentuk belah ketupat panjang dengan ujung bulat, selebar 22,50 km dan Panjang 47,00 km. Dalam cekungan ini diperkirakan 2,00 km, diisi oleh lapisan yang muda yang disebut dengan Formasi Brani, Formasi Sangkarewang, Formasi Sawahlunto, Formasi Sawah Tambang dan Formasi Ombilin. Formasi Ombilin merupakan lapisan paling muda menurut kategori zaman tersier atau berumur sekitar 2 juta tahun.

2.1.2.3. Iklim dan Meteorologi

Secara umum suhu rata-rata di Sumatera Barat tercatat antara 22°- 28°C sedangkan perbedaan antar temperatur siang dan malam antara 5°-7°C, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Kota Sawahlunto berkisar antara 22°-28°C.

Peta Curah Hujan Indonesia memberikan gambaran bahwa Kota Sawahlunto berada di dalam isohyet (garis curah hujan) antara 1.500 – 2.000 mm per tahun dengan rata-rata curah hujan per tahunnya sebesar 1.716,37 mm dengan rata-rata hari hujan 130 hari. Sepanjang tahun terdapat dua musim yaitu musim hujan pada bulan November sampai Juni dan musim kemarau pada bulan Juli sampai Oktober.

2.1.2.4. Hidrologi dan Sumber Daya Air

Kota Sawahlunto dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) INDRAGIRI yang terdiri dari 5 (lima) buah sungai atau batang utama yaitu:

- *Batang Ombilin*

Sungai Ombilin merupakan sungai terbesar yang mengalir dari utara ke selatan dari Desa Talawi Mudik ke Desa Rantih Kecamatan Talawi. Sungai ini berhulu dari Danau Singkarak dan bermuara di Batang Kuantan Riau, dengan debit sungai di daerah Sikalang-Rantih lebih dari 10 m³/detik.

Batang Malakutan

Sungai ini mengalir dari barat yang berhulu di Desa Siberambang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok ke timur melewati Desa Kolok Mudiak dan Desa Kolok

Nan Tuo di Kecamatan Barangin yang akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin.

- *Batang Lunto*

Sungai ini berhulu di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin dan mengalir dari arah barat menuju timur dan membelah kota dan bermuara di Batang Ombilin.

- *Batang Sumpahan*

Sungai ini berhulu di Kubang Utara Sikabu di Kecamatan Lembah Segar kemudian bertemu dengan Batang Lunto di Kelurahan Pasar dan akhirnya bermuara di Batang Ombilin.

- *Batang Lasi*

Sungai ini berhulu di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok yang mengalir menyusuri jalan Nasional Solok ke Sijunjung di Kecamatan Silungkang, dan keluar di perbatasan Kota Sawahlunto – Sijunjung. Sungai ini kemudian bertemu juga dengan Batang Ombilin di Sungai Kuantan atau Indragiri.

2.1.2.5. Air Tanah

Keberadaan air tanah terbatas pada kedalaman dibawah 400 m sementara celahan batuan batu pasir penyusun Formasi Sawah Tambang dan Formasi Sawahlunto kurang mengindikasikan adanya lapisan pembawa air sehingga potensi air tanah sangat kecil. Kecilnya potensi ini menyebabkan air tanah tidak dapat diandalkan sebagai salah satu sumber air baku.

2.1.2.6. Mata Air

Mata air ini muncul pada lereng bukit, dimana debit kurang dari 2 lt/detik terdapat di Sikalang, yang mengalir sepanjang tahun, sumber mata air ini umumnya jernih dan digunakan sebagai salah satu sumber air bersih penduduk setempat dan PDAM. Mata air lain dijumpai ke arah tenggara Sawahlunto di Bukit Sibantar Desa Sikalang, sementara itu sumber mata air dengan debit cukup besar yaitu lebih 5 lt/detik dan mengalir sepanjang musim terdapat di Desa Balai Batu Sandaran. Mata air tersebut muncul pada kontak antara batu gamping dan lapisan tufa yang ditampung pada kolam permanen dan dialirkan melalui pipa besi sebagai salah satu sumber air bersih Kota Sawahlunto.

2.1.3. WILAYAH RAWAN BENCANA

Bencana pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi, litologi, struktur geologi (patahan) kemiringan lereng, geomorfologi, air tanah dan daya dukung tanah. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa bencana alam yang sering terjadi berupa tanah longsor dan patahan (sesar).

Morfologi dan kemiringan lereng dapat menentukan potensi tingkat bahaya bencana gempa bumi dan longsor. Pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT.Bukit Asam dan perusahaan lainnya di daerah Sawahlunto dan sekitarnya, berperan cukup besar dalam pembentukan bentang alam atau morfologi saat ini sehingga sewaktu waktu bentang alam tersebut berubah setiap saat terutama dalam kemiringan lerengnya.

a. Struktur Geologi (Patahan)

Di Sawahlunto terdapat dua buah sesar geser yaitu sesar geser Sawahlunto dan sesar geser Batu Tajam berarah barat laut - tenggara, mengikuti arah sesar besar Sumatera, jalur kedua sesar tersebut berada di daerah pebukitan sebelah barat daya jalan raya Sawahlunto-Santur.

Secara regional struktur geologi yang berkembang di cekungan Ombilin berarah barat laut-tenggara dan timur laut - barat daya, baik itu berupa sesar/patahan maupun perlipatan. Cekungan Ombilin ini terbagi menjadi dua bagian oleh sesar normal Tanjung Ampalu/sesar Pamuatan yaitu bagian timur merupakan blok yang turun (mengarah kebawah) sedangkan bagian barat yaitu daerah Sawahlunto dan sekitarnya merupakan blok yang relatif naik.

Sesar turun Ombilin terlihat pada kontrol arah aliran Sungai Ombilin yaitu barat laut-tenggara, sedangkan sesar turun lainnya yaitu sesar Padang Malintang, sesar Batukunit, sesar Sugar, sesar Salak dan sesar Sipang berarah timur laut-barat daya.

Berdasarkan analisa struktur mikro yaitu dengan pengamatan langsung dilapangan menunjukkan adanya bidang sesar (gores garis) dan arah kekar/retakan yang dapat memberikan petunjuk arah umum dan jenis patahan. Sedangkan identifikasi adanya seretan (*drag fold*) akibat patahan dengan skala kecil, terlihat pada pemotongan tebing-tebing jalan raya propinsi, jalan raya kota dan jalan desa, serta dalam skala besar seretan pebukitan.

Beberapa sesar geser (*thrust fault*) diantaranya adalah sesar Sawahlunto merupakan sesar utama (orde pertama) yang berarah barat laut - tenggara dan sesar Sugar berarah utara selatan telah mempengaruhi pola aliran sungai Batang Lunto, sedangkan sesar Padang Malintang dan sesar Parambahan telah mempengaruhi pola aliran sungai Batang Ombilin dan anak-anak sungainya yang membentuk pola aliran sungai menangga (*trellis*).

b. *Gerakan Tanah atau Longsor (Mass Movement).*

Longsor bahan rombakan yang diakibatkan oleh ulah manusia terutama dalam pemotongan lereng untuk pembangunan perluasan perumahan ditemui sebagian di Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Barangin.

Berdasarkan data, informasi, dan kenampakan di lapangan daerah Kota Sawahlunto dan sekitarnya kendala geologi yang dominan umumnya berupa bencana alam yang disebabkan oleh proses bersifat alami, seperti gerakan tanah, zona lemah patahan dan erosi. Lebih lanjut, kendala geologi yang berupa bahaya lingkungan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

Longsor tanah tipe rayapan terjadi yang menyeret jalan Santur -Talawi atau tepatnya disekitar Washing Plant Sawah Rasau V pada km.7, terjadi pada lapisan batulempung (Formasi Sawahlunto) disebabkan karena kestabilan lereng bagian bawah terganggu oleh erosi Sungai Lurah Gadang.

c. *Gempa Bumi*

Kota Sawahlunto memiliki potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi yaitu gempa bumi, sedangkan longsor dan bidang lemah patahan akan cenderung menjadi faktor kendala dalam pengembangan wilayah. Kegempaan di Daerah Cekungan Ombilin berdasarkan catatan episenter (pusat gempa) dengan radius 400 km dari Kota Sawahlunto dari tahun 1973 sampai tahun 1999 telah terjadi sebanyak 420 kali kejadian gempa bumi. Dari catatan gempa bumi tersebut menunjukkan bahwa daerah Sawahlunto dan sekitarnya banyak terjadi gempa bumi dangkal yang rata-rata mempunyai kedalaman 33 km, dengan intensitas antara 4,5 sampai 5,5.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegempabumian, dalam banyak hal dipengaruhi oleh karakteristik tanah dan batuan setempat, di samping karakteristik guncangan (*ground shaking*) yang dihasilkan oleh suatu besaran kegempabumian (*magnitude*). Untuk memprediksi terjadinya gempa bumi di wilayah Sawahlunto secara makro didasarkan atas Peta Zonasi gempa-gempa yang bersifat merusak di Indonesia, menunjukkan posisi wilayah Ombilin atau Sawahlunto berada pada zone 3 dan 4 dengan besaran intensitas berkisar

antara 0,13 - 0,25 g. Bencana alam geologi merupakan peristiwa alam dimana proses terjadinya merupakan bagian dari dinamika bumi baik itu kaitannya secara langsung yaitu berupa pergerakan patahan/sesar maupun gempabumi, sedangkan yang tidak langsung berupa gerakan tanah/longsoran.

2.1.4. DEMOGRAFI

Dengan luas wilayah Kota Sawahlunto sekitar 273,45 km², kepadatan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2012 adalah sebanyak 212,35 jiwa/km². Kecamatan paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Silungkang dengan 316,95 jiwa/km², kemudian diikuti dengan Kecamatan Lembah Segar sebesar 230,33 jiwa/km², dan Kecamatan Barangin sebesar 196,24 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Talawi merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 182,54 jiwa/km². Berikut perbandingan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2002 sampai tahun 2012 :

TABEL 2.3
JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH, DAN KEPADATAN PENDUDUK
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 – 2012

No	Kecamatan	Rincian	TAHUN				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Talawi	Jumlah Penduduk	17.237	17.388	17.683	17.945	18.143
		-. Laki-laki	8.731	8.801	8.885	9.017	9.117
		-. Perempuan	8.506	8.587	8.798	8.928	9.026
		Luas wilayah	99.39	99.39	99.39	99.39	99.39
		Kepadatan	173.43	174.95	177.92	180.55	182.54
2	Barangin	Jumlah Penduduk	16.158	16.304	16.912	17.174	17.377
		-. Laki-laki	7.942	8.020	8.338	8.457	8.547
		-. Perempuan	8.216	8.284	8.574	8.717	8.830
		Luas wilayah	88,55	88,55	88,55	88,55	88,55
		Kepadatan	182.47	184,12	190.99	193.95	196,24
3	Lembah Segar	Jumlah Penduduk	12.034	12.044	12.145	12.150	12.111
		-. Laki-laki	5.839	5.851	5.881	5.876	5.849
		-. Perempuan	6.195	6.193	6.264	6.274	6.262

No	Kecamatan	Rincian	TAHUN				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
		Luas wilayah	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58
		Kepadatan	228,87	229,06	230,98	231,08	230,33
4	Silungkang	Jumlah Penduduk	9.484	9.555	10.126	10.298	10.437
		-. Laki-laki	4.533	4.569	5.057	5.158	5.243
		-. Perempuan	4.951	4.986	5.069	5.140	5.194
		Luas wilayah	32,93	32,93	32,93	32,93	32,93
		Kepadatan	288,00	290,16	307,50	312,72	316,95
5	Kota Sawahlunto	Jumlah Penduduk	54.913	55.291	56.866	57.567	58.068
		-. Laki-laki	27.045	27.241	28.161	28.508	28.756
		-. Perempuan	27.868	28.050	28.705	29.059	29.312
		Luas wilayah	273,45	273,45	273,45	273,45	273,45
		Kepadatan	200,82	202,20	207,96	210,52	212,35

Sumber : BPS Kota Sawahlunto tahun 2012

Berdasarkan data diatas kecenderungan setiap kecamatan mengalami peningkatan kepadatan penduduk setiap tahunnya dengan kepadatan yang relative masih sangat rendah. Namun jika dibandingkan dengan luas wilayah kota yang memiliki kelerengan relatif landai, maka angka kepadatan akan meningkat karena hanya 39,2% wilayah yang memiliki kelerengan dibawah 25%. Kota Sawahlunto pada tahun 2012 memiliki penduduk laki-laki 28.756 orang dan wanita 29.312 orang dengan sex ratio (SR) 98,00%, berarti jumlah penduduk wanita lebih banyak daripada laki-laki.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

2.2.1.1. Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum yang Tertangani

Perkembangan jumlah kasus pelanggaran hukum yang terselesaikan di kota Sawahlunto dari tahun 2009 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.4
JUMLAH KASUS PELANGGARAN HUKUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009-2012

No	Jenis Pelanggaran hukum	Jumlah perkara Dilaporkan				Jumlah Perkara tersisa				Jumlah Perkara terselesaikan			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
1.	Pidana	24	88	97	109	10	10	13	18	14	78	84	91
2.	Perdata	2	10	16	8	0	5	1	6	2	5	15	2
3.	Politik, Ham	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Lalu Lintas	65	1050	1438	1269	0	0	0	0	65	1050	1438	1269
5.	Tata Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Sawahlunto Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tahun 2012 jumlah perkara pidana yang dilaporkan 109 perkara, yang terselesaikan 91 perkara, pelanggaran lalu lintas 1269 perkara yang terselesaikan 1269, Perkara Perdata sebanyak 8 perkara terselesaikan 2 perkara, dengan demikian setiap tahun perkara yang terselesaikan berada pada kisaran 90%.

2.2.1.2. Pertumbuhan PDRB

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, Berikut adalah nilai dan kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB Kota Sawahlunto yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) periode 2008-2012:

TABEL 2.5
PERKEMBANGAN PDRB KOTA SAWAHLUNTO
2008-2012 (Rp.juta)

No	Tahun	PDRB	
		Nilai	Pertumbuhan (%)
1	2008	861.957	13,97
2	2009	984.253	14,19
3	2010	1.121.634	13,98
4	2011	1.274.070	13,59
5	2012	1.425.280	11,87

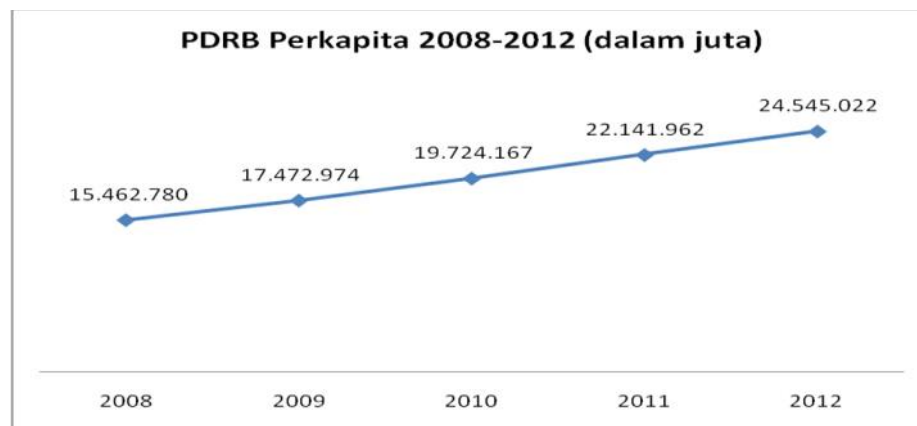
Sumber: SDA, 2012, BPS

Data diatas memperlihatkan bahwa secara nominal nilai PDRB Kota Sawahlunto selalu meningkat setiap tahunnya dari 2008 sampai 2012, namun pertumbuhannya cenderung menurun dari 13,97% pada tahun 2008 menjadi hanya 11,87% pada tahun 2012. Kondisi ini menggambarkan terjadinya pelambatan pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan yang bisa terjadi akibat menurunnya pertumbuhan output barang dan jasa atau memang pengaruh dari fluktuasi harga.

2.2.1.3. PDRB Perkapita

PDRB per kapita menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap jiwa pertahun yang sekaligus sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Selama kurun waktu 2008-2012, rata-rata angka PDRB per kapita Kota Sawahlunto menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,25%.

GRAFIK. 2.1
PDRB PERKAPITA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012 (Rp. Juta)



Sumber: SDA Tahun 2012, BPS

2.2.1.4. Angka Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan parameter utama yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi persentase penduduk diatas garis kemiskinan memperlihatkan bahwa semakin banyak penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan hidup minimalnya. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional pada kisaran 12%, maka tingkat kemiskinan kota Sawahlunto sangat rendah dengan kisaran 2%.

GRAFIK. 2.2
ANGKA KEMISKINAN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012

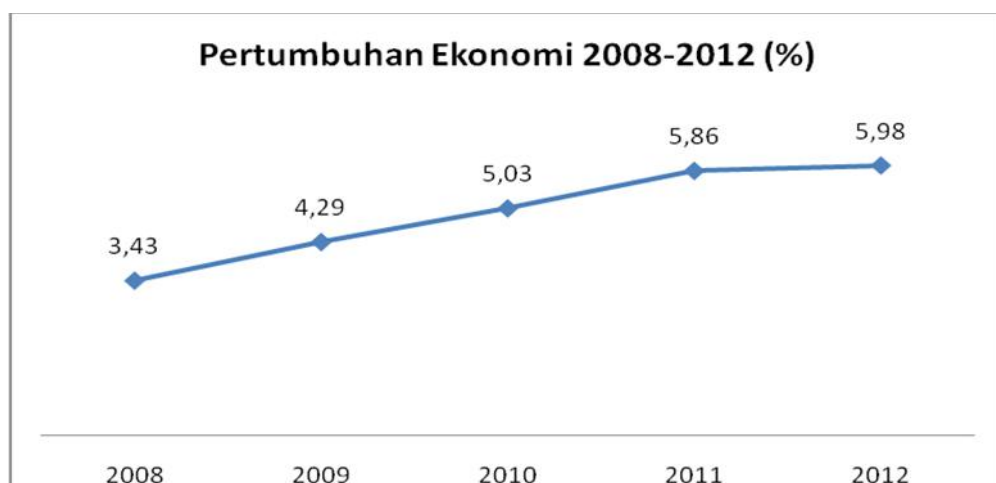


Sumber: Data Diolah

2.2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan pertumbuhan nilai produksi barang dan jasa dengan menghilangkan pengaruh dari fluktuasi harga produk barang dan jasa, karena itu pertumbuhan nilai produksi ini sangat tergantung pada peningkatan kapasitas produksi dan tentu saja dipengaruhi oleh investasi. Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto periode 2008-2012 selalu memperlihatkan trend meningkat, namun masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi , selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

GRAFIK. 2.3
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012



Sumber : PDRB Kota Sawahlunto 2012

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan setiap sector usaha pembentuk PDRB, karena pada dasarnya pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. Berikut ini dapat dilihat pertumbuhan semua sector usaha pembentuk PDRB pada kurun waktu 2008-2012.

TABEL 2.6
PERTUMBUHAN SEKTOR PEMBENTUK PDRB
2008-2012 (%)

NO	Sektor	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	7,40	5,26	7,28	3,12	9,90
2	Pertambangan Penggalian	0,89	-10,32	-15,02	-3,88	-7,66
3	Industri Pengolahan	-1,74	12,60	10,32	6,81	4,33
4	Listrik, Gas & Air Bersih	5,22	14,67	8,20	6,20	10,68
5	Bangunan	5,73	6,09	15,46	8,81	8,85
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	6,24	9,19	8,91	7,49	7,11
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4,80	7,08	8,12	8,07	8,64
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Kerusahaan	3,86	5,28	7,95	6,88	7,48
9	Jasa-Jasa	4,78	7,86	9,42	8,82	9,46

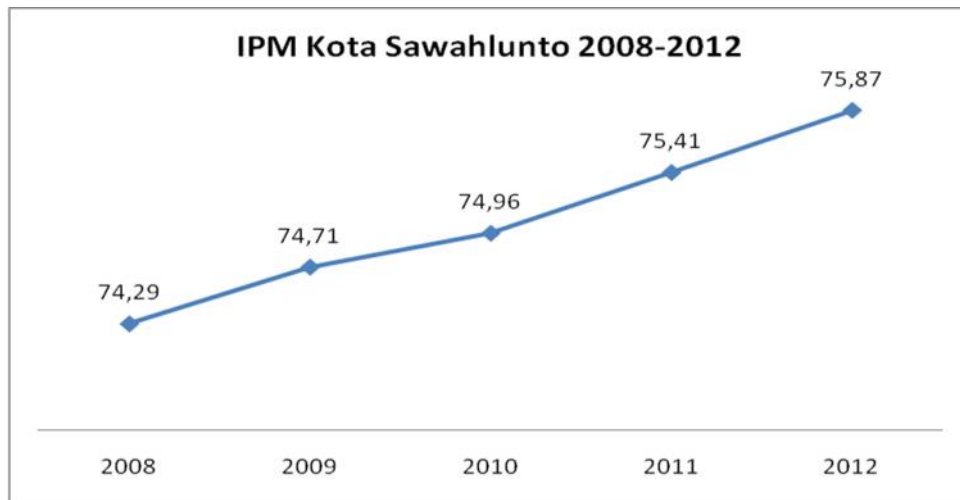
Sumber : PDRB Kota Sawahlunto 2012

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa semua sector kecuali sector pertambangan dan penggalian memperlihatkan pertumbuhan yang positif walaupun dengan angka yang fluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi 2012 pada sector listrik gas dan air bersih. Beberapa sector unggulan seperti pertanian dan jasa-jasa serta perdagangan hotel dan restoran memperlihatkan kinerja yang cukup baik dengan pertumbuhan diatas 7%, namun pertumbuhan sector industry pengolahan cenderung menurun.

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. Perkembangan Angka IPM kota Sawahlunto dapat dilihat sebagai berikut:

GRAFIK. 2.4
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012



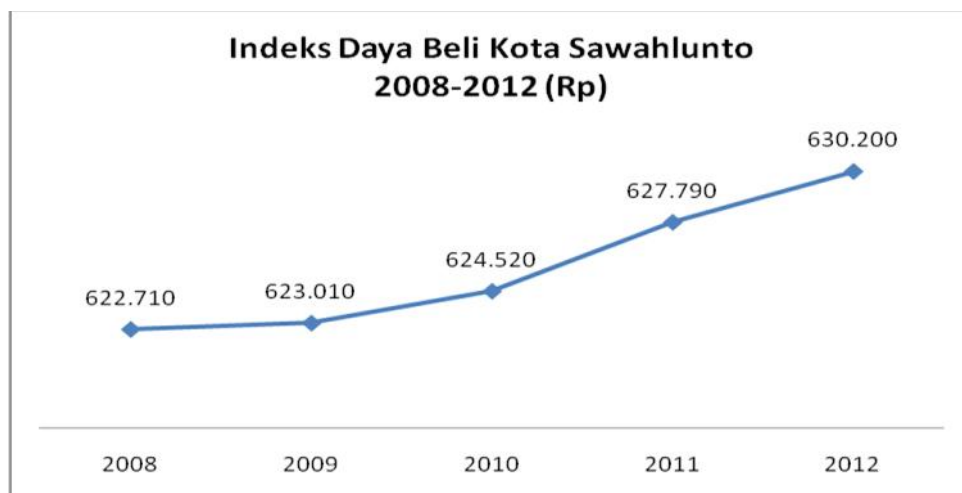
Sumber : Data Olahan Bappeda

Perkembangan IPM Kota Sawahlunto 2008-2012 memperlihatkan peningkatan yang sangat baik dan hal ini tidak terlepas dari peningkatan semua komponen pembentuk IPM

2.2.1.7. Indeks Daya Beli

Indeks daya beli diukur dari jumlah pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan, dan selama periode 2008-2012 selalu mengalami kenaikan yang dapat dilihat dari grafik berikut:

GRAFIK. 2.5
INDEKS DAYA BELI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012



Sumber : BPS 2012

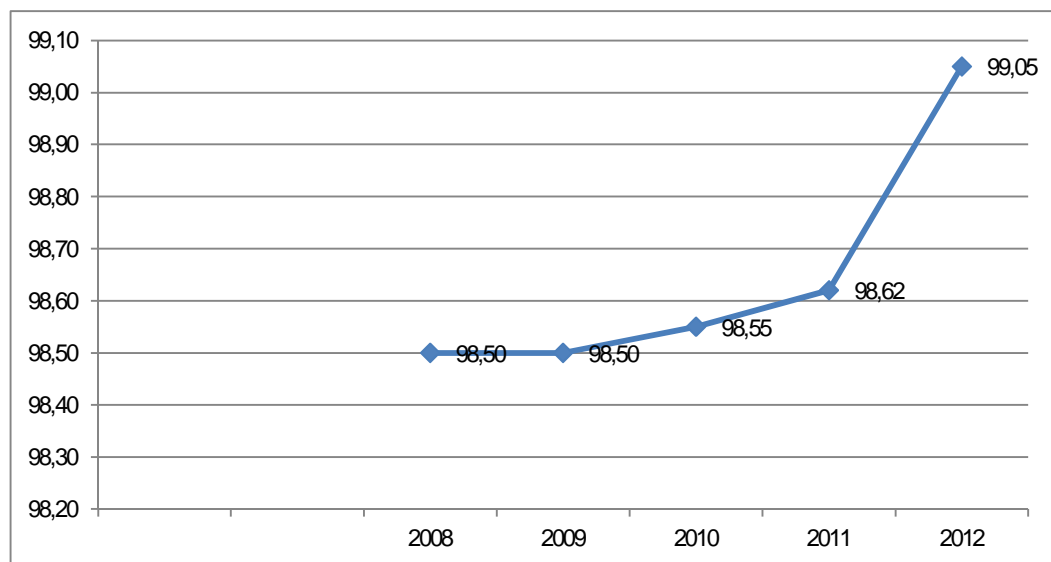
Meskipun terjadi peningkatan indeks daya beli setiap tahun namun jika dibandingkan dengan peningkatan PDRB perkapita maka indeks daya beli ini masih sangat kecil.

2.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Perkembangan Angka melek huruf di Kota Sawahlunto dari tahun 2008 sampai 2012 seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

GRAFIK 2.6
ANGKA MELEK HURUF (AMH) KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 - 2012



Sumber : Soseknaker Kota Sawahlunto Tahun 2012

Dilihat dari grafik angka melek huruf dari tahun 2008–2012 mengalami peningkatan, tahun 2012 menjadi 99,05, walaupun rata-rata kenaikannya relatif masih kecil. Grafik di atas menunjukkan pencapaian Kota Sawahlunto dalam pemberantasan buta huruf sudah cukup baik dimana angka melek huruf mencapai 99,05 persen dan angka buta huruf hanya sebesar 0,95 persen.

2.2.2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Usia 15 Tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat

disuatu daerah. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto tahun 2012 baru mencapai 9,42, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan warga kota Sawahlunto adalah baru sampai duduk di bangku kelas I SLTA.

2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan berapapun usianya terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Jika Angka Partisipasi Kasar (APK) pada suatu jenjang pendidikan tertentu melebihi 100% berarti bahwa jumlah seluruh siswa yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu melebihi jumlah penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, demikian juga sebaliknya jika APK kurang dari 100%.

Jumlah siswa yang tidak sama dengan jumlah penduduk berusia sesuai dengan jenjang pendidikan ini dapat disebabkan oleh adanya siswa yang berusia kurang dari yang seharusnya atau yang berusia melebihi yang seharusnya serta pengaruh penduduk yang bersekolah di luar daerah dan siswa yang berasal dari luar daerah, serta adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah.

TABEL 2.7
ANGKA PARTISIPASI KASAR MENURUT JENJANG PENDIDIKAN
DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 – 2012

N o	Tahun	TK (%)	SD/MI/Paket A (%)	SMP/MTs/Paket B (%)	SMA/SMK/MA/Paket C (%)
1.	2008	53,30	97,43	64,93	76,13
2.	2009	54,37	109,25	99,27	74,54
3.	2010	56,40	109,4	92,13	76,76
4.	2011	58,63	109,4	92,46	96,07
5	2012	-	107,26	89,92	101,2

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

Dilihat dari tabel di atas pada jenjang pendidikan SD sederajat dan SMA sederajat sudah melampaui 100%, yang berarti jumlah siswa SD sederajat melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan jumlah siswa SMA sederajat melebihi jumlah penduduk usia 16-18 tahun, sedangkan APK SMP sederajat yang hanya 89,92% menunjukkan bahwa jumlah siswa SMP sederajat lebih kecil dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

2.2.2.4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Dari tahun 2008 sampai 2011 Angka Partisipasi Murni dari tiap jenjang pendidikan mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun pada tahun 2012 terjadi penurunan pada semua jenjang pendidikan. Tahun 2012 pada jenjang SD sederajat APM sebesar 95,69%, jenjang SMP sederajat 65,8% dan SMA sederajat 73,67%.

TABEL 2.8
ANGKA PARTISIPASI MURNI MENURUT JENJANG PENDIDIKAN
DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 – 2012

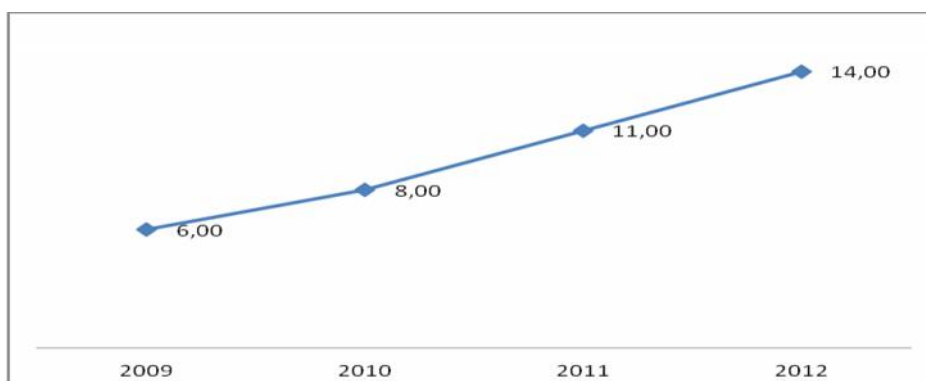
N o	Tahun	SD/MI/ Paket A (%)	SMP/MTs/ Paket B (%)	SMA/SMK/M A/Paket C (%)
1.	2008	97,43	73,26	75,39
2.	2009	96,27	73,45	76,13
3.	2010	97,43	64,93	76,13
4.	2011	96,53	73,26	76,17
5.	2012	95,69	65,8	73,67

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

2.2.2.5. Jumlah Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi adalah jumlah bay yang meninggal sebelum berusia satu tahun.

GRAFIK 2.7
JUMLAH KEMATIAN BAYI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2009 – 2012



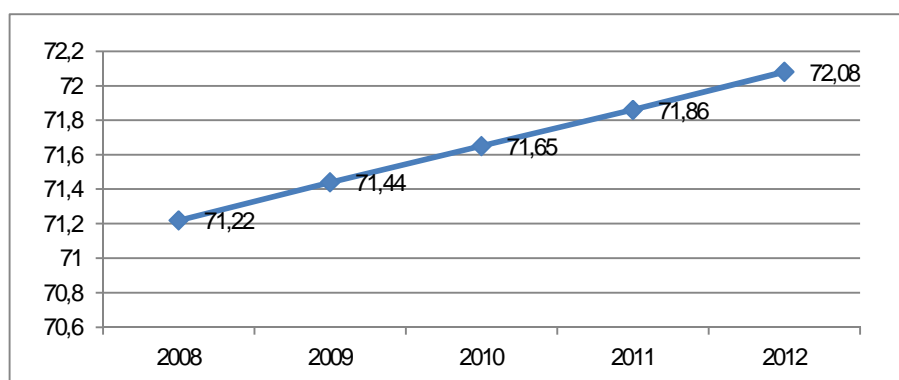
Sumber : Data Olahan Bappeda

Dilihat dari grafik diatas Jumlah kematian bayi di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti Asphiksia (terlambat mendapatkan pertolongan serta kehamilan yang telah lewat bulan/serotinus), Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang disebabkan asupan gizi ibu kurang pada waktu hamil/ibu hamil anemia, Ibu yang tidak memeriksakan kehamilannya pada petugas kesehatan dan Penyakit kelainan jantung, kelainan kongenital dan aspirasi paru.

2.2.2.6. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka ini mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir.

GRAFIK 2.8
ANGKA HARAPAN HIDUP KOTA SAWAHLUNTO PADA
TAHUN 2008 – 2012



Sumber : BPS 2012

Angka usia harapan hidup masyarakat Kota Sawahlunto sejak tahun 2008–2012 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini mencerminkan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat seiring dengan membaiknya tingkat pendapatan.

2.2.3 FOKUS ADAT, SENI, BUDAYA DAN OLAH RAGA

Pembangunan Kebudayaan di kota Sawahlunto ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Tantangan pembangunan di bidang kepemudaan adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Tantangan pembangunan di bidang olahraga adalah perlunya pembinaan keolahragaan yang komperensif dan berkesinambungan agar seluruh potensi olahraga dapat dikembangkan secara baik, penguatan peran dan tanggung jawab masyarakat beserta pemangku pembangunan.

Pembangunan di bidang seni dan budaya sudah mengalami kemajuan dengan ditandainya peningkatan terhadap pemahaman keanekaragaman budaya, pentingnya toleransi dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa adanya kekerasan serta mulai berkembangnya interaksi budaya.

TABEL 2.9
PERKEMBANGAN FASILITAS SENI, BUDAYA DAN OLAH RAGA
DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 – 2012

N o	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah Klub Olahraga	85	88	90	91	67
2.	Jumlah Gedung Olahraga	10	11	11	11	11
3.	Jumlah Grup Kesenian	53	39	33	35	35
4.	Jumlah Gedung Kesenian	7	8	8	10	10

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Dilihat dari tabel diatas ternyata untuk klub olahraga pada tahun 2011 berkurang dibandingkan tahun sebelumnya dari 91 klub menjadi 67 klub, sedangkan untuk gedung olahraga yang ada di Kota Sawahlunto mengalami penambahan 1 buah gedung menjadi 11 gedung olahraga. Grup kesenian juga mengalami

penurunan dari 53 grup tahun 2008 menjadi 35 grup kesenian pada tahun 2011, namun gedung kesenian meningkat menjadi 10 gedung kesenian pada tahun 2011.

Perubahan jumlah klub olahraga dan grup kesenian ini karena hanya klub ataupun grup yang benar-benar memiliki kepengurusan yang aktif yang dilaporkan, sedangkan yang tidak aktif tidak lagi dilaporkan.

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Kesenian)

NO		PELAYANAN DASAR				BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012				
				%	Nilai			
1		2	3		4	5	6	
I		Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian						
	I.1	Cakupan kajian seni	100	47	93	2014	-53	Belum Tercapai
	I.2	Cakupan Fasilitas seni	100	29	95	2014	-71	Belum Tercapai
	I.3	Cakupan Gelar Seni	100	75	100	2014	-25	Belum Tercapai
	I.4	Misi Kesenian	100	100	100	2014	0	Terpenuhi
II		Sarana dan Prasarana						
	II.1	Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian	100	25	100	2014	-75	Belum Tercapai
	II.2	Cakupan Tempat	100	100	100	2014	0	Terpenuhi
	II.3	Cakupan Organisasi	100	100	100	2014	0	Terpenuhi

Untuk bidang kesenian ini terdapat 7 indikator kinerja yang harus dicapai untuk setiap daerah. Pada tahun 2012 sudah terpenuhi sebanyak 3 indikator yaitu Misi Kesenian, Cakupan Tempat, Cakupan Organisasi sedangkan indikator yang lain diproyeksikan akan tercapai pada tahun 2014 yang mana merupakan batasan waktu capaian. Indikator ini tidak tercapai pada tahun 2012 disebabkan karena masih ada pelayanan pelayanan kegiatan yang belum optimal.

2.2.4 FOKUS PENGAMALAN AJARAN AGAMA

Penduduk Kota Sawahlunto memiliki keberagaman multietnis dengan beberapa agama yang dianut, dan pembangunan disektor agama didorong untuk menciptakan kondisi terbaik dalam pengamalan nilai-nilai agama dilingkungan komunitas rancangan terkecil yaitu keluarga dan tidak terlepas dari perkembangan lingkungan. Komposisi penduduk menurut agama yang dianutnya dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 2.11
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012

No	Agama	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1.	Islam	54.599	54.973	55.817	57.778
2.	Khatolik	138	152	152	133
3.	Protestan	150	150	192	157
4.	Hindu	-	-	-	-
5.	Budha	-	-	-	-

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2012

Pemeluk agama Islam dari tahun 2009 sebanyak 54.599 orang mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 57.778 orang, yang disebabkan oleh pertumbuhan secara alami penduduk yang mayoritas Islam. Penganut agama Katolik mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2009, sedangkan penguat agama Protestan sedikit meningkat.

2.2.4.1 Jumlah Penyuluh Agama dan Mubaligh

Selain tempat pendidikan agama, peranan mubaligh dan penyuluh agama sangat berpengaruh terhadap pengamalan ajaran agama bagi masyarakat, di mana perkembangan jumlah mubaligh dan penyuluh agama dapat dijelaskan pada tabel berikut :

TABEL 2.12
JUMLAH MUBALIGH DAN PENYULUH AGAMA
DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 – 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Mubaligh	170	170	81	141	141
2.	Jumlah Penyuluh Agama	103	103	103	103	103

Sumber : Data Profil Kota Sawahlunto 2012

Jumlah mubaligh mengalami penurunan dari tahun 2008 sampai 2012, dan tahun 2012 kembali bertambah menjadi 141 mubaligh. Jumlah penyuluh agama tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun tetap sebanyak 103 orang.

2.2.4.2 Jumlah Tempat Ibadah

Agama mayoritas penduduk Kota Sawahlunto adalah Agama Islam, agama lain yang dianut sebagian penduduk Kota Sawahlunto adalah Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Perkembangan kehidupan beragama sangat ditentukan oleh pemahaman dan pengamalan ajaran agama oleh penganutnya serta tidak terlepas dari keberadaan sarana ibadah sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 2.13
JUMLAH TEMPAT IBADAH DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012

No	Tempat Ibadah	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Mesjid	46	46	46	46	48
2.	Musala/Langgar	219	228	203	203	220
3.	Gereja	2	2	2	2	2

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2012

Dilihat dari Jumlah tempat Ibadah Di Kota Sawahlunto, untuk agama yang mayoritas yaitu Islam, mesjid bertambah 2 dari tahun 2008 menjadi 48 di tahun 2012 demikian juga musalla/langgar yang sempat berkurang kembali meningkat di tahun 2012, sedangkan gereja tidak mengalami perubahan.

2.2.4.3 Tempat Pendidikan Agama

Agama Islam mempunyai tempat pendidikan agama Islam untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri, di Kota Sawahlunto ada beberapa tempat pendidikan agama sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.14
JUMLAH TEMPAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 – 2012

No	Tempat Pendidikan Agama	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	TPA	158	158	158	158	172
2.	TPSA	9	9	9	9	9
3.	MDA	15	15	15	15	15
4.	Pondok Taman alquran	4	4	4	4	4
5.	Pondok Pesantren	2	2	2	2	2

Sumber : Data Profil Kota Sawahlunto 2012

Taman Pendidikan Alquran (TPA) mengalami penambahan pada tahun 2012, menjadi 172 TPA di Kota Sawahlunto seiring dengan meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam di kalangan penganutnya.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

2.3.1.1 Bidang Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia yang diharapkan yaitu, yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah ini memperlihatkan seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15

tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Pada tabel berikut dapat dilihat Perkembangan APS Kota Sawahlunto berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2008 -2012 :

TABEL 2.15
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH MENURUT JENJANG PENDIDIKAN
DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 – 2012

No	Tahun	Kelompok Umur		
		7 - 12 tahun	13 - 15 tahun	16 - 18 tahun
1.	2008	98,25	92,68	76,52
2.	2009	99,56	95,82	78,65
3.	2010	99,09	92,90	68,35
4.	2011	98,95	94,65	77,17
5.	2012	99,52	89,62	70,54

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka (SDA) tahun 2012

Dilihat dari perkembangan Angka Partipasi Sekolah Kota Sawahlunto dari tahun 2008 – 2012, mengalami peningkatan pada umur 7 – 12 tahun, sedangkan pada usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun menurun dibandingkan tahun 2011.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

TABEL 2.16
RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 – 2012

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Sekolah	65	65	65	65	65
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	6852	6897	6987	7087	7160
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	1 :105,42	1 :106,11	1 :107,49	1 :109,03	1 : 110,15
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Sekolah	13	13	13	13	14
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-	3431	3458	3240	3223	3190

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
	15					
2.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	1 :263,92	1 :266	1 :249,23	1 :247,92	1 : 227,86
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Sekolah	9	9	9	9	9
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18	3457	3490	2852	2836	2750
3.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18	1 :384,11	1 :387,7	1 :316,8	1 :315,1	1 : 306

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka tahun 2012

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa tahun 2012 ditingkat SMP, SMU dan SMK mengalami penurunan jumlah murid disetiap sekolah, sedangkan jumlah sekolah yang tersedia masih tetap dari tahun sebelumnya. Tahun 2012 untuk tingkat SMP, SMU dan SMK rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah mengalami penurunan yang disebabkan pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah.

c. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

TABEL 2.17
RASIO JUMLAH GURU TERHADAP JUMLAH MURID
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 - 2012

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	TK					
1.1	Jumlah Guru	161	192	197	203	195
1.2	Jumlah Murid	1121	1379	1222	1241	1231
1.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1 :6,96	1 :7,18	1 :6,20	1 :6,11	1 : 6,31
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Guru	732	716	815	627	751
2.2	Jumlah Murid	7233	6858	7216	7668	7951
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1 :9,88	1 :9,57	1 :8,85	1 :12,2	1 : 10,59

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Guru	382	407	334	319	280
3.2	Jumlah Murid	3008	3526	2716	2517	2045
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1 :7,87	1 :8,68	1 :8,13	1 :7,89	1 : 7,30
4	SMA/MA					
4.1	Jumlah Guru	188	210	204	188	185
	Jumlah Murid	1269	1390	1226	1240	1288
	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1 :6,75	1 :6,61	1 :6,00	1 :6,59	1 : 6,96
5	SMK					
5.1	Jumlah Guru	166	167	173	174	179
5.2	Jumlah Murid	1160	1192	1260	1271	1340
5.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1 :6,98	1 :7,13	1 :7,28	1 :7,30	1 : 7,49

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka tahun 2012

Selama kurun waktu 2008 – 2012 rasio ketersediaan guru di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan untuk setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2012 kondisi ketersediaan guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan TK adalah 1:6,31; ini berarti untuk 1 guru melayani 6,31 murid TK, untuk tingkat SD/MI 1 guru melayani 10,59 murid SD, untuk SMP 1 guru melayani 7,30 murid SMP/MTs, untuk SMU 1 guru melayani 6,96 murid SMU dan untuk SMK 1 guru melayani 7,49 murid SMK.

d. Rasio Murid dan kelas

Rasio Murid dan kelas sangat penting untuk menentukan ketersediaan kelas terhadap murid yang ada.

TABEL 2.18
RASIO JUMLAH MURID TERHADAP JUMLAH KELAS
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 – 2012

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	TK					
1.1	Jumlah Murid	1121	1379	1222	1241	1231
1.2	Jumlah Kelas	58	70	82	69	67
1.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	19,32: 1	19,7: 1	14,90: 1	17,98: 1	18,37 : 1
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Murid	7233	6858	7216	7668	7951

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
2.2	Jumlah Kelas	405	364	384	411	435
2.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	17,85: 1	18,84: 1	18,79: 1	18,65: 1	18,28 : 1
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Murid	3008	3526	2716	2517	2045
3.2	Jumlah Kelas	116	106	105	106	90
3.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	25,93: 1	33,26: 1	25,86: 1	23,74: 1	22,72 :1
4	SMA/MA					
4.1	Jumlah Murid	1269	1390	1226	1240	1288
	Jumlah Kelas	49	49	49	51	58
	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	25,89: 1	28,36: 1	25,02: 1	24,31: 1	22,21 : 1
5	o-SMK					
	Jumlah Murid	1160	1192	1260	1271	1340
4.2	Jumlah Kelas	39	39	45	38	48
4.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	29,74: 1	30,56: 1	28,0: 1	33,44: 1	27,92 : 1

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka tahun 2012

Dilihat dari tabel diatas dari tahun 2008 sampai 2012 Kota Sawahlunto mengalami peningkatan jumlah murid disetiap jenjang pendidikannya. Tahun 2012, pada jenjang pendidikan TK 1 kelas mempunyai 18,37 murid, SD 1 kelas dengan 18,28 murid, SMP 1 kelas dengan 22,72 murid, SMU 1 kelas dengan 22,21 murid dan SMK 1 kelas dengan 27,92 murid.

e. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan.

TABEL 2.19
ANGKA PUTUS SEKOLAH KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.1	Jumlah Putus Sekolah	0	0	18	8	5
1.2	Jumlah Murid	7233	6858	7216	7668	7023
1.3	Angka Putus sekolah (%)	0	0	0,002	0,001	0,0007
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Putus Sekolah	33	5	20	17	40
2.2	Jumlah Murid	3008	3526	2716	2517	2260
2.3	Angka Putus sekolah (%)	0,01	0,001	0,007	0,006	0,01
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Putus Sekolah	0	0	0	14	19
3.2	Jumlah Murid	2429	2582	2486	2511	2207
3.3	Angka Putus Sekolah (%)	0	0	0	0,005	0,008

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka tahun 2012

Untuk tingkat SD/MI angka putus sekolah mengalami penurunan dari tahun 2010-2012, ini dapat disebabkan sudah pahamnya masyarakat akan pentingnya pendidikan. Tingkat SMP/MTs angka putus sekolah mengalami peningkatan, ini bisa disebabkan karena banyaknya yang memilih bekerja daripada sekolah dan merasa cukup dengan pendidikan yang sudah ada dan tingginya biaya pendidikan sehingga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Tingkat SMA/MA/SMK angka putus sekolah menurun dari tahun sebelumnya.

f. Angka Kelulusan Siswa

Angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun mencerminkan kemampuan dan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang disampaikan serta kemampuan dalam menghadapi evaluasi belajar. Jumlah kelulusan siswa perjenjang pendidikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.20
JUMLAH KELULUSAN SISWA BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	SD					
	Ikut Ujian	1041	1022	907	969	1012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
	Lulus Ujian	1041	1022	907	969	1012
	Persentase (%)	100	100	100	100	100
2.	MI					
	Ikut Ujian	-	61	58	49	49
	Lulus Ujian	-	61	58	49	49
	Persentase (%)	-	100	100	100	100
3.	SLTP					
	Ikut Ujian	844	754	835	824	608
	Lulus Ujian	753	631	788	798	572
	Persentase (%)	89,22	83,69	94,37	96,84	94
4.	MTs					
	Ikut Ujian	-	97	113	115	114
	Lulus Ujian	-	60	108	105	111
	Persentase (%)	-	61,86	95,58	91,30	97
5.	SMU					
	Ikut Ujian	273	367	363	340	279
	Lulus Ujian	245	359	361	335	279
	Persentase (%)	89,74	97,82	99,45	98,53	100
6.	MA					
	Ikut Ujian	-	19	47	48	47
	Lulus Ujian	-	4	43	48	43
	Persentase (%)	-	21,05	91,49	100	91
7.	SMK					
	Ikut Ujian	332	351	338	356	338
	Lulus Ujian	315	323	336	356	336
	Persentase (%)	94,88	92,02	99,41	100	99

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka tahun 2012

Tingkat SD/MI pada tahun 2012 kelulusan siswa sudah mencapai 100%. Tingkat SMP kelulusan siswa tahun 2012 sebesar 94% menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan kelulusan MTs tahun 2012 sebesar 97%. Tingkat SLTA, kelulusan untuk SMU tahun 2012 sebesar 100%, untuk MA kelulusan siswa mencapai 91% tahun 2012 dan SMK kelulusan siswa tahun 2012 sebesar 99%. Secara umum kelulusan siswa di setiap jenjang pendidikan di Kota Sawahlunto sangat baik sekali mendekati 100%, namun pada tingkat SLTP perlu menjadi perhatian karena angkanya baru mencapai 94%.

g. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Tabel 2.21
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

NO	PELAYANAN DASAR				KESENJANG AN /GAP (%)	KRITERIA
	INDIKATOR	LEVEL	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)		
1	2	3	4	5	6	7
I	Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota					
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	SD	100	100	0	Terpenuhi
		MI	100	100	0	Terpenuhi
		SMP	100	100	0	Terpenuhi
		MTs	100	100	0	Terpenuhi
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	SD	93	3,7	-89,3	Belum Tercapai
		MI	93	5	-88	Belum Tercapai
		SMP	93	3	-90	Belum Tercapai
		MTs	93	5	-88	Belum Tercapai
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP	45	36,7	-8,3	Belum Tercapai
		MTs	45	36,6	-8,4	Belum Tercapai
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD	80	67,6	-12,4	Belum Tercapai
		MI	80	68,1	-11,9	Belum Tercapai
		SMP	80	66,05	-13,95	Belum Tercapai
		MTs	80	66,1	-13,9	Belum Tercapai
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	SD	85	90	5	Terlampau i
		MI	85	90	5	Terlampau i
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP	87	88	89	Terlampau i
		MTs	87	90	3	Terlampau i

NO		PELAYANAN DASAR				KESENJANG AN /GAP (%)	KRITERIA
		INDIKATOR	LEVEL	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)		
1		2	3	4	5	6	7
	7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	SD	100	100	0	Terpenuhi
			MI	100	100	0	Terpenuhi
	8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;	SMP	100	100	0	Terpenuhi
			MTs	100	100	0	Terpenuhi
	9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	SMP	100	100	0	Terpenuhi
			MTs	100	100	0	Terpenuhi
	10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SD	100	100	0	Terpenuhi
			MI	100	100	0	Terpenuhi
	11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SMP	100	100	0	Terpenuhi
			MTs	100	100	0	Terpenuhi
	12	Di setiap ka/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik;	SD	100	100	0	Terpenuhi
			MI	100	100	0	Terpenuhi
			SMP	100	100	0	Terpenuhi
			MTs	100	100	0	Terpenuhi
	13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	SD	100	100	0	Terpenuhi
			MI	100	100	0	Terpenuhi
			SMP	100	100	0	Terpenuhi
			MTs	100	100	0	Terpenuhi
	14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	SD	100	100	0	Terpenuhi
			MI	100	100	0	Terpenuhi
			SMP	100	100	0	Terpenuhi
			MTs	100	100	0	Terpenuhi
II	Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan						
1	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	SD	90	0	-90	Belum Tercapai	
		MI	90	0	-90	Belum Tercapai	
2	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;	SMP	90	0	-90	Belum Tercapai	
		MTs	90	0	-90	Belum Tercapai	
3	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	85	100	15	Terlampau i	
		MI	85	100	15	Terlampau i	
4	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD	85	100	15	Terlampau i	
		MI	85	100	15	Terlampau i	
		SMP	85	0	-85	Belum Tercapai	

NO	PELAYANAN DASAR				KESENJANG AN /GAP (%)	KRITERIA	
	INDIKATOR	LEVEL	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIA N SPM 2012 (%)			
1		2	3	4	5	6	7
			Mts	85	0	-85	Belum Tercapai
	5	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	SD	100	100	0	Terpenuhi
			MI	100	100	0	Terpenuhi
			SMP	100	100	0	Terpenuhi
			MTs	100	100	0	Terpenuhi
	6	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;	SD	100	100	0	Terpenuhi
			MI	100	100	0	Terpenuhi
			SMP	100	100	0	Terpenuhi
			MTs	100	100	0	Terpenuhi
	7	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;	SD	100	100	0	Terpenuhi
			MI	100	100	0	Terpenuhi
			SMP	100	100	0	Terpenuhi
			MTs	100	100	0	Terpenuhi
	8	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;	SD	90	100	10	Terpenuhi
			MI	90	100	10	Terpenuhi
			SMP	90	100	10	Terpenuhi
			MTs	90	100	10	Terpenuhi
	9	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;	SD	90	100	10	Terpenuhi
			MI	90	100	10	Terpenuhi
			SMP	90	100	10	Terpenuhi
			MTs	90	100	10	Terpenuhi
	10	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;	SD	90	100	10	Terpenuhi
			MI	90	100	10	Terpenuhi
			SMP	90	100	10	Terpenuhi
			MTs	90	100	10	Terpenuhi
	11	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;	SD	100	100	0	Terpenuhi
			MI	100	100	0	Terpenuhi
			SMP	100	100	0	Terpenuhi
MTs			100	100	0	Terpenuhi	
12	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester;	SD	100	100	0	Terpenuhi	
		MI	100	100	0	Terpenuhi	
		SMP	100	100	0	Terpenuhi	
		MTs	100	100	0	Terpenuhi	
13	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	SD	90	100	10	Terpenuhi	
		MI	90	100	10	Terpenuhi	
		SMP	90	100	10	Terpenuhi	
		MTs	90	100	10	Terpenuhi	

Untuk bidang pendidikan ini terdapat 27 indikator kinerja yang harus dicapai untuk setiap daerah. Pada tahun 2012 sudah terpenuhi sebanyak 21 indikator yaitu (1) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil. (2) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan. (3) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran. (4) Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. (5) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%. (6) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. (7) Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. (8) Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. (9) Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik. (10) Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. (11) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan. (12) Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA. (13) Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. (14) Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu. (15) Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku. (16) Setiap guru menerapkan

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya. (17) Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. (18) Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester. (19) Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik. (20) Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester. (21) Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) sedangkan indikator yang lain diproyeksikan akan tercapai pada tahun 2014 yang mana merupakan batasan waktu capaian. Diantara 27 indikator kinerja di bidang pendidikan tersebut terdapat 4 indikator kinerja yang melampaui Kesenjangan GAP > 0, hal ini bertanda bahwa SPM untuk 4 indikator kinerja tersebut berhasil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3.1.2 Bidang Kesehatan

a. Rumah Sakit

Rumah Sakit Sawahlunto merupakan rumah sakit tipe C yang mempunyai tenaga dokter spesialis yang tetap sebanyak 9 orang, yaitu, kebidanan, penyakit dalam, bedah umum, mata, patologi klinik, anak, kulit dan kelamin serta anestesi, sedangkan reveral meliputi dokter spesialis syaraf dan spesialis telinga hidung dan tenggorokan. Dokter umum 17 orang serta dokter gigi 3 orang diperkuat oleh tenaga paramedis 124 orang, tenaga penunjang 84 orang dan tenaga administrasi 50 orang.

b. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan

kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

TABEL 2.22
JUMLAH POSYANDU DAN BALITA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Posyandu	94	96	97	97	98
2.	Jumlah Balita	5.618	5.761	5.965	5.965	5.969
3.	Rasio Posyandu/ jumlah balita	1 : 59,77	1 : 60,01	1 : 61,49	1 : 61,49	1 : 60,91

Sumber : Profil Kota Sawahlunto tahun 2012

Jumlah posyandu pada tahun 2008 – 2012 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah balita. Dilihat dari rasio posyandu dan balita mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 2011 yaitu 1 : 61,49, ini berarti bahwa setiap posyandu pada tahun 2010 dan 2011 rata-rata melayani 61 sampai 62 balita. Pada tahun 2012 rasio posyandu terhadap balita 1 : 60,91, ini berarti bahwa rata-rata setiap posyandu yang ada pada tahun 2012 dapat melayani sebanyak 60 sampai 61 balita.

c. Rasio Puskesmas, Praktik Dokter dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan Penduduk

Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu merupakan salah satu penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

TABEL 2.23
RASIO PUSKESMAS, PRAKTIK DOKTER DAN PUSTU KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Puskesmas	6	6	6	6	6
2.	Jumlah Praktek Dokter	34	37	37	13	16
3.	Jumlah Pustu	25	25	25	25	23
	Jumlah Total Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu	65	68	68	44	45
4.	Jumlah Penduduk	54.913	55.291	56.866	57.567	58.068

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	1 : 9.152	1 : 9.215	1 : 9.478	1 : 9.595	1 : 9.678
	Rasio Praktek Dokter persatuan penduduk	1 : 1.615	1 : 1.494	1 : 1.537	1 : 4.428	1 : 3.629,25
	Rasio Pustu persatuan penduduk	1 : 2.196,5	1 : 2.212	1 : 2.275	1 : 2.303	1 : 2524,70
	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu persatuan penduduk	1 : 844,8	1 : 813	1 : 836	1 : 1.308	1 : 1290,40
5.	Jumlah Kecamatan	4	4	4	4	4
6	Jumlah Desa/Kelurahan	37	37	37	37	37

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2012

Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Sawahlunto pada tahun 2012 mencapai 1 : 1.290,40, ini artinya bahwa 1 puskesmas/praktek dokter/pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 1.291 jiwa. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan mencapai 3 : 2, ini artinya bahwa dalam dua kecamatan terdapat 3 unit puskesmas.

Jumlah penduduk yang harus dilayani Puskesmas/Praktek Dokter/Pustu tahun 2012 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, karena berkurangnya jumlah praktek dokter. Pada tahun 2008 setiap satu Puskesmas/Praktek Dokter/Pustu harus melayani 844 penduduk, pada tahun 2009 harus melayani 813 penduduk, tahun 2010 harus melayani 836 penduduk dan untuk tahun 2011 harus melayani 1.308 penduduk. Berkurangnya praktek dokter tidak terlepas dari semakin meningkatnya kualitas dan fasilitas pelayanan yang ada pada Puskesmas/Pustu serta RSUD dan bertambahnya jumlah penduduk yang tercover jaminan pemeliharaan kesehatan.

d. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Tabel 2.24
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

NO	PELAYANAN DASAR			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN/GAP (%)	Kriteria
	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)			
1	2	3	4	5	6	7
I	PELAYANAN DASAR KESEHATAN					
	I.1 IK-1 CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K4	95	86,13	2015	-8,87	Belum tercapai
	I.2 IK-2 CAKUPAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI	80	123,19	2015	43,19	Terlampau

NO	PELAYANAN DASAR			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN/GAP (%)	Kriteria
	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)			
1	2	3	4	5	6	7
I.3	IK-3 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN	90	91,44	2015	1,44	Terlampai
I.4	IK-4 CAKUPAN PELAYANAN IBU NIFAS	90	93,37	2015	3,37	Terlampai
I.5	IK-5 CAKUPAN NEONATUS DENGAN KOMPLIKASI YANG DITANGANI	80	61,33	2010	-18,67	Belum tercapai
I.6	IK-6 CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI	90	94,82	2010	4,82	Terlampai
I.7	IK-7 CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION	100	91,07	2010	-8,93	Belum tercapai
I.8	IK-8 CAKUPAN PELAYANAN ANAK DAN BALITA	90	76,39	2010	-13,61	Belum tercapai
I.9	IK-9 CAKUPAN PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI PADA ANAK USIA 6-24 BULAN KELUARGA MISKIN	100	7,41	2010	tidak ada data	Tidak ada data
I.10	CAKUPAN BALITA GIZI BURUK YANG MENDAPAT PERAWATAN	100	100	2010	0	Terpenuhi
I.11	CAKUPAN PENJARINGAN SISWA SD DAN SETINGKAT	100	94	2010	-6	Belum tercapai
I.12	CAKUPAN PESERTA KB.AKTIF	70	247,91	2010	177,91	Terlampai
I.13	IK-13 CAKUPAN PENEMUAN DAN PENANGANAN PENDERITA PENYAKIT					
13.a	Acute Flacid Paralysis (AFP)	1	3,19	2010	2,19	Terlampai
13.b	PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA BALITA	100	42,09	2010	-57,91	Belum tercapai
13.c	PENEMUAN PENDERITA BARU PENDERITA TBC BTA+	100	87,10	2010	-12,9	Belum tercapai
13.d	PENDERITA DEMAM BERDARAH DONGUE (DBD) YANG DITANGANI	100	100	2010	0	Terpenuhi
13.e	PENEMUAN PENDERITA DIARE	100	37,41	2010	-62,59	Belum tercapai
I.14	IK-14 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR MASYARAKAT MISKIN	100	87	2015	-13	Belum tercapai
II	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN					

NO		PELAYANAN DASAR			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN/GAP (%)	Kriteria
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)			
1		2	3	4	5	6	7
	II.1	IK-15 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN MASYARAKAT MISKIN	100	salah rumus	2015	Tidak ada data	Tidak ada data
	II.2	IK-16 CAKUPAN PELAYANAN GAWAT DARURAT LEVEL 1 YANG HARUS DIBERIKAN SARANA KESEHATAN (RS) KAB	100	75	2015	Tidak ada data	Tidak ada data
III	PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB						
	III.1	IK-17 CAKUPAN DESA/KELURAHAN MENGALAMI KLB YANG DILAKUKAN PENYELIDIKAN EPIDEMOLOGI<24 JAM	100	100	2015	0	Terpenuhi
IV	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
	IV.1	IK-18 CAKUPAN DESA SIAGA AKTIF	80	97,08	2015	17,08	Terlampau

Untuk bidang kesehatan ini terdapat 22 indikator kinerja yang harus dicapai untuk setiap daerah. Pada tahun 2012 sdh terpenuhi sebanyak 10 indikator yaitu cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan, cakupan peserta kb.aktif, acute flacid paralysis (afp), penderita demam berdarah dengue (dbd) yang ditangani, cakupan desa/kelurahan mengalami klb yang dilakukan penyelidikan epidemiologi<24 jam, cakupan desa siaga aktif sedangkan indikator yang lain diproyeksikan akan tercapai pada tahun 2014 yang mana merupakan batasan waktu capaian. Indikator ini tidak tercapai pada tahun 2012 disebabkan karena masih ada pelayanan pelayanan kegiatan yang belum optimal. Diantara 22 indikator kinerja di bidang kesehatan tersebut terdapat 7 indikator kinerja yang melampaui Kesenjangan GAP > 0 (berhasil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat) dan 4 indikator kinerja yang tidak mempunyai Kriteria (tidak ada data).

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

NO	PELAYANAN DASAR						
	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	CAPAIAN PM S 2012	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN (%) GAP /	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial						
a.	Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota	Persentase(%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80	0	2015	-80	Belum tercapai
b.	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	Persentase(%) PMKS skala kab/kota Yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80	2	2015	-78	Belum tercapai
2.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial						
a.	Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80	89	2015	9	Terlampau
b.	Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota	Presentase(%) wahana Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	60	0	2015	-60	Belum tercapai
3.	Penanggulangan korban bencana						
a.	Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	80	100	2015	20	Terlampau

NO	PELAYANAN DASAR						
	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	CAPAIAN PM S 2012	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESenjangan (%) GAP /	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/kota	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80	0	2015	-80	Belum tercapai
4.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial						
	a. Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40	0	2015	-40	Belum tercapai
	Ket : Untuk Target Satuannya KK / Jiwa / Orang						

Untuk bidang sosial ini terdapat 7 indikator kinerja yang harus dicapai untuk setiap daerah. Pada tahun 2012 capaian kinerja untuk bidang social belum ada yang terpenuhi tetapi ada 2 indikator kinerja yang melampaui yaitu Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sedangkan indikator yang lain diproyeksikan akan tercapai pada tahun 2014 yang mana merupakan batasan waktu capaian. Indikator ini tidak tercapai pada tahun 2012 disebabkan karena masih ada Program-program kegiatan yang belum dilaksanakan.

2.3.1.3 Bidang Kependudukan dan capil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk positif jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar kedalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

TABEL 2.26
JUMLAH PENDUDUK DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN
TAHUN 2012

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)			Laju Pertumbuhan (%)
		2010	2011	2012	2012
1.	Silungkang	10.126	10.298	10.437	1,34
2.	Lembah Segar	12.145	12.150	12.111	0,32
3.	Barangin	16.912	17.174	17.377	1,18
4.	Talawi	17.683	17.945	18.143	1,10
Total		56.866	57.567	58.068	0,87

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Dilihat dari tabel diatas pertumbuhan penduduk selalu bervariasi dari tahun 2010 sampai 2012 dimana tahun 2012 hanya sebesar 0,87%. Kecamatan Silungkang merupakan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi, hal ini tidak terlepas dari posisinya yang berada di jalan lintas nasional yang sangat potensial dalam pengembangan usaha perdagangan dan jasa.

b. Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tertib administrasi kependudukan yang dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, Akte kelahiran dan Akte Nikah. Berikut disajikan data mengenai kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebagai berikut:

TABEL 2.27
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KEPEMILIKAN KTP, AKTE LAHIR, AKTE NIKAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 – 2012

No	Kepemilikan	2008	2009	2010	2011	2012
1.	KTP					
	Sudah Memiliki (jiwa)	40.240	39.080	41.200	42.590	40.110
2.	Jumlah Bayi Lahir ber Akte Kelahiran					
	Sudah Memiliki (bayi)	235	537	508	414	585

No	Kepemilikan	2008	2009	2010	2011	2012
	Belum Memiliki (bayi)	795	558	559	760	334
3.	Surat Nikah					
	Sudah Memiliki (pasangan)	13.010	12.746	13.012	13.273	-
	Belum Memiliki (pasangan)	284	532	149	410	-

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Pada tahun 2012 jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP tercatat sebanyak 40.110 jiwa atau sekitar 92,7% dari keseluruhan penduduk usia wajib KTP sebanyak 43.282 jiwa.

Sebanyak 585 bayi atau 63,65 % bayi yang lahir pada tahun 2012 juga telah memiliki akta kelahiran. Dibandingkan tahun sebelumnya hanya 35,26% yang memiliki akta kelahiran, sedangkan pasangan yang sudah memiliki akta nikah tahun 2011 sebanyak 13.273 pasangan atau sekitar 97% dari keseluruhan 13.682 pasangan nikah.

c. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kependudukan

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

NO		PELAYANAN DASAR			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)			
1		2	3	4	5	6	
I		Pelayanan Dokumen Kependudukan					
	I.1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100	81,9	2011	-18,1	Belum Tercapai
	I.2	Cakupan penerbitan Akte Kelahiran	50	72,6	2011	22,6	Terlampau

Untuk bidang kependudukan ini terdapat 2 indikator kinerja yang harus dicapai untuk setiap daerah. Pada tahun 2012 capaian kinerja untuk bidang social belum ada yang terpenuhi tetapi ada 1 indikator kinerja yang melampaui yaitu Cakupan penerbitan Akte Kelahiran sedangkan indikator yang lain diproyeksikan akan tercapai pada tahun 2014 yang mana merupakan batasan waktu capaian. Indikator ini tidak

tercapai pada tahun 2012 disebabkan karena masih ada Program-program kegiatan yang sudah ditetapkan belum berjalan optimal.

2.3.1.4 Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari Indikator kinerja sebagai berikut :

Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran didalam kehidupan berumah tangga. Data tentang Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilihat pada table berikut:

TABEL 2.29
JUMLAH KDRT DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012

No	Uraian	2010	2011	2012
1.	Jumlah KDRT	8	2	5
2.	Jumlah Rumah Tangga	14.051	14.244	17.642
3.	Rasio KDRT	1 : 1756,38	1 : 7122,00	1 : 3528,4

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Jumlah kejadian KDRT di Kota Sawahlunto pada tahun 2012 sebanyak 5 kasus KDRT dari jumlah rumah tangga yang ada. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 8 KDRT, namun meningkat tajam dibandingkan tahun 2011 dengan 2 kasus.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perlindungan Ibu dan Anak

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
	INDIKATOR		%			
1	2	3	4	5	6	7
I	Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak					

NO		JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
		INDIKATOR		%			
1		2	3	4	5	6	7
	I.1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100%	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
II		Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan					
	II.1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
	II.2	Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)	100	100	2014	0	Terpenuhi
	II.3	Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	60	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
	II.4	Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas	100	100	2014	0	Terpenuhi

NO		JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
		INDIKATOR		%			
1		2	3	4	5	6	7
	II.5	Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit	100	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
III		Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan					
	III.1	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	80	100	2014	20	Terlampau
	III.2	Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih	80	100	2014	20	Terlampau
	III.3	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	90	Tidak ada data	2012	Tidak ada data	Tidak ada data
	III.4	Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani	75	100	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
IV		Penegakan dan Bantuan Hukum bagi Perempuan dan Anak Koran Kekerasan	75	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data

NO		JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
		INDIKATOR		%			
1		2	3	4	5	6	7
	IV.1	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	75	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
	IV.2	Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian	75	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
	IV.3	Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta	90	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
	IV.4	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA	80	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
	IV.5	Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender	80	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
	IV.6	Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80	33,33	2014	-46,67	Belum tercapai
	IV.7	Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak	80	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data

NO		JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
		INDIKATOR		%			
1		2	3	4	5	6	7
	IV.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
	IV.9	Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	50	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
V	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan						
	V.1	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
	V.2	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
	V.3	Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial	100	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data

Untuk bidang Perlindungan Ibu dan Anak ini terdapat 22 indikator kinerja yang harus dicapai untuk setiap daerah. Pada tahun 2012 sudah terpenuhi sebanyak 2 indikator yaitu (1) Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A). (2) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas, sedangkan indikator yang lain diproyeksikan akan tercapai

pada tahun 2014 yang mana merupakan batasan waktu capaian. Diantara 22 indikator kinerja di bidang Perlindungan Ibu dan Anak tersebut terdapat 2 indikator kinerja yang melampaui Kesenjangan GAP > 0, hal ini bertanda bahwa SPM untuk 2 indikator kinerja tersebut berhasil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3.1.5 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Rata-rata Jumlah Anak per keluarga

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik.

TABEL 2.31
RATA-RATA JUMLAH ANAK PER RUMAH TANGGA DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah Rumah Tangga	13.615	14.379	14.395	14.051	14.244
2.	Jumlah Penduduk	53.686	54.913	55.291	56.866	57.567
2.	Rata – rata jumlah anak perumah Tangga	1,94	1,82	1,84	2,05	2,04

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Dilihat dari data di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga di Kota Sawahlunto mengalami fluktuatif. Tahun 2007 rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga 1,94 orang. Tahun 2011 rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,04 orang. Jika dibandingkan dengan target 2 orang anak setiap rumah tangga pada program Keluarga Berencana tingkat nasional, maka dapat dikatakan program Keluarga Berencana di Kota Sawahlunto sudah berjalan.

b. Rasio Akseptor KB

Program KB dimaksudkan untuk menciptakan keluarga kecil yang berkualitas sekaligus menekan laju pertumbuhan penduduk disamping itu juga mengurangi resiko tingkat kematian anak serta tingkat kematian ibu.

TABEL 2.32
RASIO AKSEPTOR KB DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah PUS	9.524	9.460	9.697	9.575	9.528
2.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	6.763	6.830	7.210	6.841	6.911
3.	Jumlah Tidak ber KB	2.761	2.630	2.487	2.487	2.617
4.	Rasio Akseptor KB	71,01	72,20	74,35	71,45	72,53

Sumber : PMPKB

Rasio akseptor KB tahun 2012 sebesar 72,53 ini berarti sudah cukup tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya KB.

c. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana

NO		PELAYANAN DASAR			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)			
1		2	3	4	5	6	7
I		Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)					
	I.1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 th	100	3,5	2014	-96,5	Belum Tercapai
	I.2	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	100	77,33	2014	-22,67	Belum Tercapai
	I.3	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%	100	22,67	2014	-77,33	Belum Tercapai
	I.4	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70%	100	84,02	2014	-15,98	Belum Tercapai

NO		PELAYANAN DASAR			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)			
1		2	3	4	5	6	7
	I.5	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	100	81,18	2014	-18,82	Belum Tercapai
	I.6	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	100	198,82	2014	98,82	Terlampau
	I.7	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan	100	100	2014	0	Terpenuhi
II		Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi					
	I.8	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi utk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun	100	57,58	2014	-42,42	Belum Tercapai
III		Penyediaan Informasi Data Makro					
	I.9	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan 100% setiap Tahun	100	100	2014	0	Terpenuhi

Untuk Bidang Keluarga Berencana ini terdapat 9 indikator kinerja yang harus dicapai untuk setiap daerah. Pada tahun 2012 sudah terpenuhi sebanyak 2 indikator yaitu (1) Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan (2) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan 100% setiap Tahun, sedangkan indikator yang lain diproyeksikan akan tercapai pada tahun 2014 yang mana merupakan batasan waktu capaian. Diantara 9 indikator kinerja di Bidang Keluarga Berencana tersebut terdapat 1 indikator kinerja

yang melampaui Kesenjangan GAP > 0, hal ini bertanda bahwa SPM untuk 1 indikator kinerja tersebut berhasil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3.1.6 Sosial Budaya

Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dijaga dan dilestarikan, sekaigus sebagai salah satu asset pusaka yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai kota yang telah eksis sejak zaman Belanda, Sawahlunto memiliki banyak benda cagar budaya yang perlu dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai salah satu keunggulan local yang dimiliki.

Berikut ini dapat dilihat tabel sarana penyelenggara seni dan budaya dan benda cagar budaya yang dilestarikan sebagai berikut :

TABEL 2.34
PERKEMBANGAN SARANA SENI DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
TAHUN 2008 - 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah sarana Penyelenggaraan kesenian (Set)	9	9	9	9	9
2.	Jumlah Penyelenggaraan Seni (Kali)	2	2	2	2	2
3.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan	10	13	20	23	23
4.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah	73	74	74	74	74
5.	Presentase jumlah Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan (%)	13,69 %	17,57 %	27,03 %	31,08 %	31,04%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Sampai tahun 2011 sebanyak 31,08 % benda situs dan kawasan cagar budaya telah dikelola dan dilestarikan dengan sangat baik, karena itu dalam rangka pelestarian budaya salah satu langkah yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah revitalisasi kawasan cagar budaya. Dalam konteks pelestarian budaya, Pemerintah kota juga telah memelihara Benda Cagar Budaya (BCB) seperti bangunan tua dengan arsitektur Eropa peninggalan Belanda yang direhabilitasi dengan mempertahankan keaslian bentuknya dan dijadikan sebagai objek wisata,

2.3.1.7 Kepemudaan dan olah Raga

Berkaitan dengan urusan kepemudaan dapat dilihat dari organisasi pemuda dan olahraga. Semakin banyak organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam membudayakan pemuda. Organisasi kepemudaan berperan dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang dibidang olahraga dan dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 2.35
JUMLAH ORGANISASI PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2008 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	11	11	14	14	14
2.	Jumlah Organisasi Olahraga	22	23	23	24	24

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Sawahlunto dari Tahun 2008 sampai Tahun 2012 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2008 11 organisasi dan Tahun 2012 menjadi 14 Organisasi Pemuda di Kota Sawahlunto. Begitu juga dengan jumlah Organisasi Olahraga di Kota Sawahlunto juga mengalami peningkatan.

2.3.1.8 Ketenagakerjaan

Dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satu indikator yang sering digunakan adalah jumlah penduduk yang bekerja. Banyaknya penduduk yang bekerja pada suatu wilayah, secara umum dapat menggambarkan tingginya kesejahteraan masyarakat pada wilayah tersebut, karena angka tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan yang berpengaruh pada pemenuhan kehidupan yang layak serta stabilitas ekonomi.

Persentase penduduk Kota Sawahlunto usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha secara rinci mulai tahun 2008 – tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL : 2.36
PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS DI KOTA SAWAHLUNTO YANG BEKERJA
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2008-2012

NO	LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	21,91	19,25	19,35	23,50	20,58

NO	LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010	2011	2012
2	Pertambangan & Penggalian	8,59	7,80	9,46	13,10	11,85
3	Industri Pengolahan	10,89	9,10	10,13	4,40	6,82
4	Listrik,Gas & Air Bersih	0,99	1,89	1,42	1,50	2,92
5	Bangunan	8,53	5,78	6,53	6,70	3,56
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	17,79	19,13	15,84	21,10	22,00
7	Pengangkutan & Komunikasi	6,16	10,36	6,34	5,20	4,25
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,77	2,17	1,87	2,10	3,01
9	Jasa-Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	23,37	24,52	29,05	22,40	25,00
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2012

Lapangan pekerjaan di Kota Sawahlunto pada tahun 2012 umumnya bergerak pada lapangan usaha sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebanyak 25% , disusul pada urutan kedua oleh sector Perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 22%. Serta diikuti oleh sektor pertanian pada urutan lapangan usaha terbanyak ketiga sebesar 20,58%. Selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2008 hingga tahun 2012, persentase penduduk 15 tahun keatas yang bekerja pada bidang usaha listrik, gas, dan air minum selalu yang terendah.

Tingkat Pengangguran

Berdasarkan publikasi International Labour Organization (ILO), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu : tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan penduduk usia 15 tahun ke atas menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2008-2012.

TABEL 2.37
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT ANGKATAN KERJA
DAN BUKAN ANGKATAN KERJA TAHUN 2008-2012

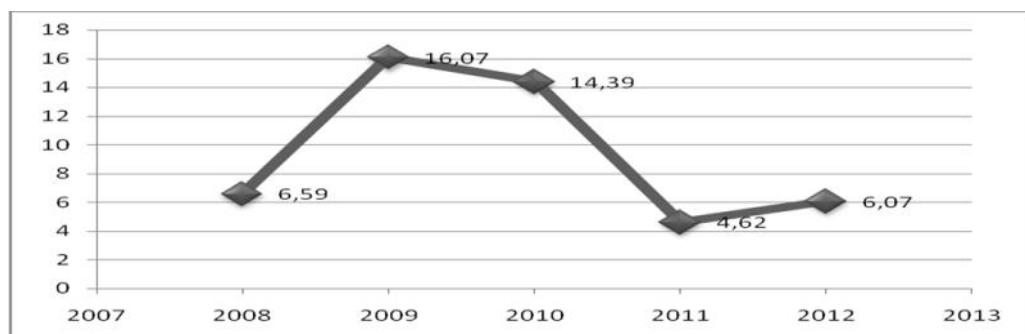
NO	URAIAN	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	ANGKATAN KERJA					
	a. Bekerja	47,79	49,21	64,05	64,45	68,35
	b. Pengangguran		9,42	10,76	3,12	4,42
	c. penduduk angkatan kerja (a+b)		58,63	74,81	67,57	72,77
	d. Rasio bekerja (a:b)		0,84	0,86	0,95	0,94
2	BUKAN ANGKATAN KERJA					
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)		41,37	25,19	32,43	27,23
3	Jumlah penduduk usia kerja		100	100	100	100
4	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)		58,63	74,81	67,57	72,77
5	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	6,59	16,07	14,39	4,62	6,07

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2012

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa sejak 2008 sampai 2012 jumlah penduduk angkatan kerja lebih besar dari jumlah penduduk bukan angkatan kerja, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Pada tahun 2012, persentase penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja (menganggur) sebanyak 4,42%, sedangkan keseluruhan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2012 sebesar 6,07%.

GRAFIK 2.9
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012 (%)



Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2012

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara pencari kerja dengan angkatan kerja. Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa Persentase tingkat pengangguran terbuka di Kota Sawahlunto dari tahun 2008 hingga tahun 2012 cukup berfluktuasi dari 6,59 persen ke 16,07 persen. Peningkatan tajam terjadi dari tahun 2008 ke tahun 2009, dan penurunan yang cukup tajam juga terjadi tahun 2010 hingga tahun 2011, yakni dari 14,39 persen menjadi 4,62 persen.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan

NO	PELAYANAN DASAR				
	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%) 2016	CAPAIAN SPM 2012 (%)	BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM	KESENJANGAN (GAP)
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Pelatihan Kerja				
1.1.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75	16	2016	-59
1.2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60	25	2016	-35
1.3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60	45	2016	-15
2.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja				
2.1	Besaran tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70	32	2016	-38
3.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				
3.1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50	90	2016	40
4.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek				
4.1.	Besaran Pekerja Buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	50	46	2016	-4
5.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan				

NO	PELAYANAN DASAR				
	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%) 2016	CAPAIAN SPM 2012 (%)	BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM	KESENJANGAN (GAP)
1	2	3	4	5	6
5.1.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45	20	2016	-25
5.2.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50	41	2016	-9

2.3.1.9 Koperasi dan UMKM

TABEL 2.39
JUMLAH KOPERASI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012 (%)

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah koperasi aktif	71	70	70	74	65
2	Jumlah koperasi	77	78	79	74	76
3	Persentase koperasi aktif	92,21	89,74	88,61	100	85,53

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2012

Sejak tahun 2008 hingga 2012, persentase koperasi yang aktif selalu berada diatas 85 %, meskipun demikian pada tahun 2012 jumlah koperasi aktif berkurang hal ini tidak terlepas dari kemampuan manajerial para pengurus dalam mengelola koperasi.

Selain koperasi keberadaan Usaha Kecil dan Menengah serta Bank Perkreditan Rakyat dan lembaga Keuangan Mikro sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta dalam menyediakan modal bagi pelaku usaha local. Berikut ini perkembangan UKM, BPR dan LKM selama 2008-2011.

TABEL 2.40
JUMLAH UKM NON BPR/LKM UKM DAN JUMLAH BPR/LKM
TAHUN 2008 – 2011

NO	UKM NON BPR/LKM UKM	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah UKM NON BPR/LKM UKM	560	445	434	452
2	Jumlah BPR	7	7	7	6
3	Jumlah LKM	62	62	62	62

Sumber : SDA 2012 dan Dinas Perindagkopnaker 2012

Sejak tahun 2008 – 2011, jumlah LKM sebanyak 62 unit, dan tidak mengalami perubahan, sejalan dengan ini jumlah BPR yang ada mengalami pengurangan dari 7 unit menjadi 6 unit.

2.3.1.10 Penanaman modal

Pelayanan Penanaman modal di kota Sawahlunto dilaksanakan oleh beberapa SKPD sesuai bidang masing-masing sehingga dalam pelaporan juga belum terlaksana secara baik. Investasi terbesar dilaksanakan oleh pemerintah melalui APBD atau APBN, sedangkan investasi swasta masih sangat kecil dengan nilai tidak terlalu besar.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penanaman Modal

NO		PELAYANAN DASAR				BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)				
				Nilai	Capaian			
1	2	3	4			5	6	12
I		Kebijakan Penanaman Modal						
	I.1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) sektor/ bidang usaha unggulan/ tahun	min 1 (satu) sektor/bidang usaha unggulan pertahun	Untuk target Tahun 2011 dan 2012 terdiri dari 4 bidang usaha berupa informasi umum atas potensi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas: tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan	2014	0	Terpenuhi
II		Kerjasama Penanaman Modal						
	II.1	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan:						
	1	antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing.						

NO		PELAYANAN DASAR				BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)				
				Nilai	Capaian			
1	2	3	4		5	6	12	
	2	antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali/ tahun	1 (satu) kali pertahun		2014	0	Terpenuhi
III		Promosi Penanaman Modal						
	III.1	Terselenggaranya promosi peluang penenaman modal provinsi.						
	III.2	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	1 (satu) kali/ tahun	3 (tiga) kali	Kepesertaan pada gelar/promosi investasi	2014	2 (dua) Kali	Terlampai
IV		Pelayanan Penanaman Modal						
		Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:						
	IV.1	Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi.	100			2014		
	IV.2	Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.	100	80	20	2014	-80	Belum Tercapai
V		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						
	V.1	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/ tahun	1 (satu) kali/ tahun		2014	0	Terpenuhi
VI		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal						

NO		PELAYANAN DASAR				BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)				
				Nilai	Capaian			
1	2	3	4		5	6	12	
	VI.1	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).	100	50		2014	-50	Belum Tercapai
VII		Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.						
	VII.1	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/ tahun	1 (satu) kali		2014	0	Terpenuhi

2.3.1.11 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan sangat ditentukan oleh produksi bahan pangan utama yang dihasilkan para petani local dan perkembangan tingkat kebutuhan pangan yang dipengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk selaku konsumen. Berikut ini perkembangan ketersediaan pangan utama kota Sawahlunto tahun 2008-2012.

TABEL 2.42
KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA
TAHUN 2008-2012

NO	KETERSEDIAAN PANGAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Ton)	12.370,0	11.689,0	13.523,0	12.397,0	16.192.47
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	54.913	55.291	56.866	57.567	58.068
3	Ketersediaan pangan utama (ton/jiwa/Tahun)	0,225	0,211	0,238	0,215	0,279

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2012

Ketersediaan pangan utama penduduk di Kota Sawahlunto mengandung maksud untuk tahun 2012 satu orang penduduk tersedia bahan pangan sebesar 0,279 ton/tahun atau sebesar 279 kg/tahun. Angka ini dianggap cukup karena rata-rata kebutuhan pangan utama setiap penduduk adalah 102,81 kg/tahun.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan

NO		JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
		INDIKATOR		%			
1		2	3		5	6	7
I		Ketersediaan dan Cadangan Pangan					
	1	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	90	178	2015	88	Terlampau
	2	Penguatan Cadangan Pangan	60	319	2015	259	Terlampau
		Distribusi dan Akses Pangan					
	1	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90	33	2015	-57	Belum tercapai
	2	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90	Tidak dapat dihitung	2015	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung
III		Penganekaragaman dan Keamanan Pangan					
	a.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH	90	70	2015	-20	
	b.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	Tidak bisa dilakukan	2015	Tidak bisa dilakukan	Tidak bisa dilakukan
IV		Penanganan Kerawanan Pangan					
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	Tidak didapatkan daerah rawan pangan	2015	Tidak didapatkan daerah rawan pangan	Tidak didapatkan daerah rawan pangan

2.3.1.12 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari tahun 2008 hingga saat ini berjumlah 37 buah, dengan rincian masing-masing Desa/Kelurahan memiliki satu buah LPM yang merupakan mitra kepala desa /kelurahan dalam menjalankan pemerintahan di tingkat terdepan.

Disamping itu peranan PKK dalam pembinaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk kelompok binaan yang berada dan meyebar ditengah masyarakat. Pembinaan yang dilakukan meliputi bidang pemberdayaan ekonomi keluarga serta kehidupan social rumah tangga. Jumlah unit PKK yang ada di Kota Sawahlunto sebanyak 42 unit, yakni 37 PKK Desa/Kelurahan, 4 PKK Kecamatan dan 1 PKK Kota Sawahlunto. Setiap PKK yang ada di Kota Sawahlunto memiliki kelompok binaan, yang total berjumlah 222 buah kelompok binaan. Perkembangan kelompok binaan PKK selama kurun 2008-2012 sebagai berikut :

TABEL 2.44
RATA-RATA JUMLAH KELOMPOK BINAAN PKK
Tahun 2008-2012

NO	KELOMPOK BINAAN PKK	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Kelompok Binaan PKK	222	222	222	222	222
2	Jumlah PKK	42	42	42	42	42
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

Sumber : SDA 2012

Jumlah unit PKK yang ada di Kota Sawahlunto sebanyak 42 unit, yakni 37 PKK Desa/Kelurahan, 4 PKK Kecamatan dan 1 PKK Kota Keberradaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi sangat penting sebagai perwujudan dan wadah masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan daerah dan pada tahun 2012 LSM di Kota Sawahlunto tercatat 11 buah LSM

2.3.1.13 Pekerjaan Umum

Aspek pelayanan umum terkait dengan bidang Pekerjaan Umum terdiri dari :

a. Jaringan Jalan

Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi social budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal masyarakat

dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai panjang jaringan jalan Kota Sawahlunto berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2008-2012.

TABEL 2.45
KONDISI DAN PANJANG JALAN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012

NO	URAIAN	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kondisi Baik (Km)	234,14	209,99	214,4	288,48	291,27
2	Kondisi rusak ringan (Km)	87,82	89,32	89,35	89,37	88,82
3	Kondisi Rusak Sedang (Km)	73,22	50,15	50,12	34,65	33,45
4	Kondisi rusak berat (Km)	45,11	90,83	86,42	27,79	26,75
5	Jalan Kota secara keseluruhan (Km)	440,29	440,29	440,29	440,29	440,29
6	Proporsi kondisi baik (%)	53,18	47,69	48,70	65,52	66,15
7	Proporsi Kondisi rusak ringan (%)	19,95	20,29	20,29	20,30	20,17
8	Proporsi Kondisi Rusak Sedang (%)	16,63	11,39	11,38	7,87	7,60
9	Proporsi Kondisi rusak berat (%)	10,25	20,63	19,63	6,31	6,08

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2012

Kondisi jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kota Sawahlunto pada tahun 2008 mencapai 53,18% pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 66,15%, demikian halnya dengan proporsi kondisi jalan rusak berat mengalami penurunan yaitu dari 10,25% pada tahun 2008 menjadi 6,08% pada tahun 2012.

b. Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi padi adalah jaringan irigasi, Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya, Perkembangan jaringan irigasi selama 2008-2012 dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 2.46
JARINGAN IRIGASI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah daerah irigasi (DI)	87	87	87	87	87
2	Luas Potensial (Ha)	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
3	Luas Terairi (Ha)	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
	a. 1/2 Teknis	166	419	503	534	508,88
	b. Sederhana	445	285	285	258	277,58
	c. Non-PU	195	168	84	20	-
	d. Tadah Hujan	966	900	900	960	-
4	Panjang Saluran (Km)	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2012

Jumlah Daerah Irigasi (DI) dari tahun 2008 sampai tahun 2012 tidak ada peningkatan yaitu sebanyak 87 DI, begitu juga dengan luas potensial daerah irigasi dari tahun 2008 sampai tahun 2012 seluas 1.772 ha. sedangkan untuk luas daerah irigasi yang terairi menggunakan sistem pengairan ½ teknis pada tahun 2008 seluas 166 ha meningkat pada tahun 2011 seluas 534 ha, sistem pengairan sederhana pada tahun 2008 seluas 445 Ha menurun pada tahun 2011 seluas 258 Ha, sistem pengairan Non-PU pada tahun 2008 menurun pada tahun 2011 seluas 20 Ha, sistem pengairan tadah hujan pada tahun 2008 seluas 966 ha menurun pada tahun 2011 seluas 960 Ha. Dan panjang saluran jaringan irigasi dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sepanjang 35,2 km.

c. Sanitasi

Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi dasar berhasil dicapai dengan adanya berbagai program yang telah digulirkan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut tabel perkembangan proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Dasar di Kota Sawahlunto tahun 2008 s/d 2012 :

TABEL 2.47
PERSENTASE PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI DASAR
TAHUN 2008 s/d 2012

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Rumah Tangga	14.374	13.891	14.051	14.209	17.642
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Dasar	8.265	8.654	9.372	9.601	12.355

3	Persentase	57,5	62,3	66,7	67,57	70,03
---	------------	------	------	------	-------	-------

Sumber : Dinkessos Kota Sawahlunto

Persentase proporsi Rumah Tangga dengan akses Sanitasi Dasar terus mengalami peningkatan yaitu 57,5 % (2008), 62,3 % (2009), 66,7 % (2010), 67,57 % (2011), dan 70,03 % (2012). Dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar (jamban keluarga) berdampak terhadap meningkatnya jumlah Desa / Kelurahan yang telah dinyatakan sebagai Desa/Kelurahan **ODF (Open Defecation Free)/SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)** yang semula 3 desa ditahun 2010, menjadi 19 desa di tahun 2012.

d. Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Sebagai Kota kecil di Sumatera Barat, Pemerintah Kota Sawahlunto wajib menyediakan Tempat pemakamam umum bagi masyarakatnya. Untuk hal ini, Kota Sawahlunto diuntungkan dengan luasnya wilayah di Kota Sawahlunto. keberadaan tanah kaum yang menyediakan Pandam Pekuburan Khusus bagi kaumnya meringankan kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan Tempat Pemakaman umum. Berikut ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Sawahlunto kondisi 2011 da 2012 :

TABEL 2.48
KETERSEDIAAN TPU KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2011 – 2012

NO	URAIAN	2011	2012
1	Ketersedian TPU (lokasi/ha)	7/2,5	7/2,5
2	Daya Tampung (kuburan/ha)	1.100	1.100
3	Ketersediaan TPU (kuburan/m ²)	2.750	2.750
4	Kebutuhan TPU (kuburan/m ²)	6.124	6.387
5	Kebutuhan TPU yang harus disediakan (kuburan/m ²)	3.374	3.637

Sumber: Buku Profil Daerah (Bappeda)

Jumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Sawahlunto sebanyak 7 lokasi dengan total luas 2,5 ha. Kebutuhan TPU untuk Kota Sawahlunto di Tahun 2012 adalah sebanyak 6.387 kuburan/ha, sementara yang teredia baru 2.750 kuburan/ha. Untuk memenuhi kebutuhan TPU harus tersedia sebanyak 3.637 kuburan/ha. Disamping itu masing-masing kaum dalam hubungan kekerabatan

suku juga memiliki tempat pemakaman sendiri (kuburan keluarga) yang luasnya bervariasi dan tersebar di permukiman perdesaan.

e. Kebakaran

Bencana kebakaran di Kota Sawahlunto termasuk yang jarang terjadi. Keberadaan rumah penduduk yang tidak begitu rapat juga mempermudah jangkauan pelayanan pemadaman kebakaran. Hal ini berdampak positif dengan pelayanan prima terkait pemadaman kebakaran kepada masyarakat. Berikut data pemadaman kebakaran di Kota sawahlunto dua tahun terakhir :

TABEL 2.49
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2011 – 2012

NO	URAIAN	2011	2012
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit)	2	4
	Kebutuhan Mobil Pemadam (unit)	6	6
2	Jumlah Hidran Umum (unit)	0	0
	Kebutuhan Hidran Umum (unit)	±100	±100
3	Jumlah Kasus Kebakaran	36	17
4	Perkiraan Kerugian (Juta Rupiah)	438,568	413,833
5	Bantuan Pemerintah (Juta Rupiah)	18,5	52,254

Sumber: Profil Kota Sawahlunto Tahun 2012

Khusus kebakaran rumah sebagian besar disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Oleh karena itu instalasi listrik rumah tangga setiap 5 (lima) tahun harus diganti. Jumlah sarana pemadam kebakaran masih kurang 2 unit pemadam kebakaran dimana pada tahun 2012 tersedia 4 mobil pemadam kebakaran (3 unit mobil besar dan 1 unit mobil kecil) untuk melayani daerah yang sempit. Selain itu kebutuhan akan hidran umum juga sangat dibutuhkan, dimana pada saat ini belum ada hidran umum yang siap dioperasikan untuk penanggulangan bencana kebakaran di Kota Sawahlunto.

f. Rasio Panjang Jalan per Luas Wilayah

Untuk melihat keberhasilan suatu Kota dalam penyediaan jalan kepada masyarakatnya, dapat dilihat dari rasio panjang jalan dengan luas wilayah. Berikut data panjang jalan di Kota Sawahlunto dengan perbandingan luas wilayah di Kota Sawahlunto

TABEL 2.50
RASIO PANJANG JALAN DENGAN LUAS WILAYAH
TAHUN 2008 – 2012

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jalan Negara (Km)	8,15	8,15	30,59	30,59	30,59
2	Jalan Provinsi (Km)	27,09	27,09	4,65	4,65	4,65
3	Jalan Kota (Km)	440,00	440,29	440,29	440,29	440,29
	Total Panjang Jalan (Km)	476,05	476,34	476,34	476,34	476,34
	Luas Wilayah (Km ²)	273,45	273,45	273,45	273,45	273,45
	Rasio	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Dalam kurun waktu 5 tahun kebelakang ini panjang jalan di kota Sawahlunto tidak mengalami penambahan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari Luas wilayah Kota seluas 273,45 Km² dengan panjang jalan 476,34 Km sehingga rasio panjang jalan dengan luas wilayah adalah 1,74. atau untuk 1 jiwa penduduk, tersedia jalan seluas 820,31 M².

g. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

NO		PELAYANAN DASAR			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)			
1		2	3	4	5	6	7
I		Sumber Daya Air Prioritas utama penyediaan Air untuk Kebutuhan Masyarakat					
	I.1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari	100	42,49	2014	-57,51	Belum Tercapai
	I.2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	70	93	2014	23	Terlampau
II		Jalan - Jaringan Keselamatan, kondisi Jalan, dan Kecepatan					

NO		PELAYANAN DASAR			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)			
1		2	3	4	5	6	7
	II.1	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat - pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten / kota	100	100	2014	0	Terpenuhi
	II.2	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan	100	176,93	2014	76,93	Terlampai
	II.3	Tersediannya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60	52,89	2014	-7,11	Belum Tercapai
	II.4	Tersediannya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60	52,89	2014	-7,11	Belum Tercapai
	II.5	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60	52,89	2014	-7,11	Belum Tercapai
III		Air Minum/Cluster pelayanan/Baik/Sedang/Buruk					
	III.1	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jarigan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari		Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
IV		Penanggulangan Bencana Kebakaran					
	IV.1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	25	14,7	2015	-10,3	Belum Tercapai
	IV.2	Tingkat Waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75	56,3	2015	-18,7	Belum Tercapai

2.3.1.14 Perumahan Rakyat

a. Persentase Luas Permukiman Yang Tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kota Sawahlunto terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman

TABEL 2.52
PERSENTASE LUAS PERMUKIMAN YANG TERTATA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2011-2012

NO	URAIAN	2011	2012
1	Luas area permukiman tertata (ha)	1.134	1.134
2	Total Luas area permukiman (ha)	3.063	3.240
3	Persentase Luas Permukiman yang Tertata (%)	37,02	35.0

Sumber : RTRW, RP4D

b. Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Pemerintah Kota Sawahlunto telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan ketersediaan perumahan layak dan sehat.

TABEL 2.53
PERSENTASE RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah rumah tidak layak huni (unit)	2.702	2.421	2.112	1.904	1.829
2.	Jumlah rumah tangga (RT)	11.065	11.890	11.990	12.090	14.090
3.	Persentase rumah tidak layak huni	18,80	17,42	15,03	13,07	12.98

Sumber : RP4D, Laporan PNPM P2KP tahun 2011

Pada tahun 2008 jumlah rumah tidak layak huni mencapai 2.702 unit dan berkurang menjadi 1.829 unit rumah pada tahun 2012. Penurunan rumah tidak layak huni ditangani dari berbagai program dalam bentuk rehabilitasi dan bantuan biaya rehab rumah tidak layak huni.

c. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan

NO	PELAYANAN DASAR			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA	
	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)				
1	2	3	4	5	6		
I		Rumah Layak Huni dan Terjangkau					
	I.1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	80	2025	-20	Belum Tercapai
	I.2	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	70	80	2025	10	Terlampai
II		Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)					
	II.1	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100	71,7	2025	-28,3	Belum Tercapai

2.3.1.15 Penataan Ruang

Penyusunan RTRW Kota Sawahlunto menghasilkan suatu wujud keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor yang ada di dalam ruang. Agar RTRW Kota Sawahlunto bisa dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam pembangunan wilayah kota maka produk rencana tata ruang tersebut sudah dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, dimana RTRW Kota Sawahlunto akan menjadi pedoman untuk pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang,

Kondisi Kota Sawahlunto terkait dengan urusan penataan ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, social, budaya, ekonomi dan estetika. Kebutuhan luas RTH publik Kota Sawahlunto pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota 27.345 Ha. Terdiri dari 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat, sehingga kebutuhan RTH adalah

8.203 ha meliputi RTH privat adalah 2.734 ha, dan RTH publik seluas 5.469 ha. Perkembangan RTH kota Sawahlunto sejak 2008-2012 dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 2.55
RASIO RTH PER SATUAN LUAS DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)	1.146	1.621	2.096	2.571	2.946
2	Luas Wilayah (ha)	27.345	27.345	27.345	27.345	27.345
3	Persentase (%)	4,19	5,92	7,66	9,40	10,77

Sumber: Bappeda Kota Sawahlunto

Ketersediaan RTH di Kota Sawahlunto dari tahun 2008 seluas 1,146 ha atau sebesar 4,19% dari luas Kota dan terus meningkat hingga pada tahun 2012 terdapat RTH publik dan privat dengan luas keseluruhan 2,946 ha atau sebesar 10,77% dari luas kota, sehingga Kota Sawahlunto masih membutuhkan tambahan RTH minimal seluas 19,23% dari luas wilayah kota yang diupayakan dari keberadaan taman kota yang ada di Kota Sawahlunto beserta Kawasan Sempadan (Sempadan Sungai dan Rel Kereta Api).

b. Rasio Bangunan yang Memiliki IMB

Setiap orang/badan usaha di Kota Sawahlunto yang akan mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku harus memiliki izin membuat bangunan (IMB), hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang Kota Sawahlunto. Perkembangan rumah dan bangunan yang memiliki IMB dari tahun 2008 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.56
RASIO BANGUNAN BER IMB KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Bangunan	11.065	11.890	11.990	12.090	13.117
2	Jumlah Bangunan ber-IMB	4.662	4.662	5.120	5.219	5.824
3	Rasio	0,42	0,40	0,43	0,44	0,45

Sumber: BPS Kota Sawahlunto

Pada tahun 2008 jumlah bangunan yang memiliki IMB sebanyak 4.662 unit dari 11.065 unit bangunan dengan rasio bangunan ber IMB mencapai 0.42 sedangkan pada tahun 2012 jumlah bangunan yang telah memiliki IMB sebanyak 5.824 unit dari 13.117 unit rumah dengan rasio 0,44, hal ini memperlihatkan bahwa jumlah bangunan di Kota Sawahlunto yang memiliki IMB relatif masih rendah.

c. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penataan Ruang

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang

NO	PELAYANAN DASAR			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA	
	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)				
1	2	3	4	5	6	7	
I		Penataan Bangunan dan Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)					
	I.1	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten / Kota	100	318	2014	218	Terlampau
	I.2	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	100	100	2014	0	Terpenuhi
II		Jasa Konstruksi, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Sistem Informasi Jasa Konstruksi					
	II.1	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
	II.2	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
III		Penataan Bangunan dan Lingkungan/Informasi Penataan Ruang/Pelibatan Peran Masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang/Izin Pemanfaatan Ruang					
	III.1	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang melalui peta analog dan peta digital	100 (kabupaten/ kota dan kecamatan)	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
			90 (Kelurahan)	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data

NO	PELAYANAN DASAR			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)			
1	2	3	4	5	6	7
	III.2 Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik memenuhi syarat inklusif dalam proses rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang	100	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
	III.3 Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
	III.4 Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	100	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
	III.5 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25	1,74	2014	-23,26	Belum Tercapai

2.3.1.16 Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut;

a. Persentase Penanganan Sampah

Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah

akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Perkembangan persentase sampah yang tertangani dari tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut;

TABEL 2.58
PERSENTASE PENANGANAN SAMPAH KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Rata-rata volume sampah yang tertangani di TPA (m ³ /hari)	20,00	20,00	20,00	21,27	19,43
2	Rata-rata volume sampah yang dihasilkan (m ³ /hari)	94,72	95,38	98,09	99,30	100,16
3	Persentase Penanganan Sampah di TPA (%)	15,84	15,73	18,20	16,06	14,55

Sumber : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Sawahlunto

Pada tahun 2008 sampai tahun 2010 rata-rata volume penanganan sampah di TPA sebesar 20 M³/hari, pada tahun 2011 sebesar 21,27 M³/hari dan tahun 2012 sebesar 19,43M³/hari. Persentase penanganan sampah di TPA masih sangat rendah yaitu pada tahun 2012 masih 14,55% yang dikelola di TPA Kayu Gadang.

b. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Rasio Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut;

TABEL 2.59
RASIO JUMLAH TPSS DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah TPSS (unit)	146	146	246	246	251
2	Jumlah Daya Tampung TPSS (m ³)	90,9	90,9	106,2	106,2	107,7
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	54.913	55.291	56.866	57.567	58.068
4	Rasio Daya Tampung TPSS thd Jumlah penduduk (m ³ /1000 jiwa)	1,7	1,6	1,9	1,8	1,9

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto

Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto tahun 2008 sebanyak 146 unit dengan daya tampung 90,9 M³, rasio daya tampung TPSS terhadap jumlah penduduk 1,7 m³ di tahun 2008, meningkat menjadi 1,9 per 1.000 jiwa, artinya untuk setiap 1000 jiwa tersedia TPSS 1,9 m³. hal ini sudah mencukupi mengingat mengingat produksi setiap 1000 jiwa adalah 1,698 m³ per hari.

c. Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah

Pengangkutan sampah yang dihasilkan rumah tangga dan lainnya dari TPS menuju TPA menggunakan truk pengangkutan sampah setiap hari. Berikut disajikan data rasio truk pengangkut sampah terhadap jumlah penduduk di Kota Sawahlunto

TABEL 2.60
RASIO JUMLAH TRUK PENGANGKUT SAMPAH KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Truk Pengangkut Sampah (unit)	8	8	8	7	7
2	Jumlah Daya Tampung Truk (m ³)	32	32	32	28	28
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	54.913	55.291	56.866	57.567	58.064
4	Rasio Daya Tampung Truk thd Jumlah penduduk	0,00058	0,00058	0,00056	0,00049	0,00048

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto

Jumlah truk pengangkut sampah yang ada di Kota Sawahlunto mengalami penurunan dari tahun 2008 sebanyak 8 unit menjadi 7 unit pada tahun 2012, dengan kapasitas 28 m³, sehingga rasio daya tampung truk terhadap 1000 penduduk tahun 2012 adalah 0,48 yang berarti kemampuan untuk mengangkut sampah dengan truk hanya sebanyak 480 kg untuk setiap 1000 penduduk. Kemampuan daya tampung ini dirasa sangat kurang karena setiap 1000 penduduk menghasilkan sampah 1.698 kg per hari.

d. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup

NO	PELAYANAN DASAR			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN (GAP)	KKRITERIA
	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%) 2013	CAPAIAN SPM 2012 (%)			
1	2	3	4	5	6	7
I	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air					
I.1	Prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi an teknis pencegahan pencemaran air	100	80	2013	-20	Belum Tercapai
II.	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak					
II.1	Prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100	60	2013	-40	Belum Tercapai
III	Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Lahan dan /atau Tanah untuk Produksi Bio massa					
III.1	Prosentase luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100	0	2013	-100	Belum Tercapai
IV	Pelayanan Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan Lingkungan					
IV.1	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	90	0	2013	-90	Belum Tercapai
V	Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)					
V.1	Tersediannya sistem air limbah setempat yang memadai	60	2,5	2014	-57,5	Belum Tercapai
V.2	Tersediannya sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota	5	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
V.3	Tersediannya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	20	11,2	2014	-8,8	Belum Tercapai
V.4	Tersediannya sistem penanganan sampah di perkotaan	70	5,35	2014	-64,65	Belum Tercapai
V.5	Tersediannya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun)	50	1,74	2014	-48,26	Belum Tercapai
VI	Penanganan Pemukiman Kumuh Perkotaan					

NO	PELAYANAN DASAR			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN (GAP)	KKRITERIA
	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%) 2013	CAPAIAN SPM 2012 (%)			
1	2	3	4	5	6	7
VI.1	Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	10	Tidak ada data	2014	Tidak ada data	Tidak ada data

2.3.1.17 Perhubungan

Pemerintah Kota Sawahlunto selalu meningkatkan kualitas dan potensi perhubungan sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kondisi daerah Kota Sawahlunto terkait dengan urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

a. Moda Transportasi

TABEL 2.62
JUMLAH DAN JENIS MODA TRANSPORTASI
TAHUN 2009-2012

NO	JENIS ANGKUTAN	Satuan	2009	2010	2011	2012
1	Truck	Unit	216	222	236	281
2	Bus/Mikro Bus	Unit	19	20	25	19
3	Pick Up	Unit	324	246	353	303
4	Angkot	Unit	68	68	49	46
5	Sedan	Unit	114	124	119	128
6	Jeep	Unit	112	116	123	123
7	Kereta Api	Unit	2	2	2	2
8	Travel Biro	Buah	25	25	25	25
9	Sepeda Motor	Unit	9.338	9.972	10.980	11.631
10	Bus Pariwisata	Unit	2	2	2	2

Sumber: SAMSAT Kota Sawahlunto

Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa dalam 4 tahun terakhir jumlah sepeda motor dari tahun 2009 sebanyak 9.338 unit mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2012 sudah mencapai 11.631 unit. sedangkan angkutan kota terjadi penurunan pada tahun 2012 menjadi 46 unit dari 68 unit di tahun 2009.

b. Sarana Lalu Lintas

Dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, maka disediakan berbagai sarana pendukung antara lain rambu rambu lalu lintas, kaca tikungan, warning light dan sebagainya. Namun penyediaan sarana pendukung ini masih perlu ditingkatkan, khususnya pada ruas-ruas jalan utama, pada daerah yang ramai aktivitasnya dan pada daerah yang rawan kecelakaan lalu lintas. Ketersediaan sarana pendukung lalu lintas sangat diperlukan dengan semakin tingginya arus lalu lintas yang ada di ruas-ruas jalan di Kota Sawahlunto.

TABEL 2.63
SARANA LALU LINTAS JALAN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012

NO	SARANA LALU LINTAS	Satuan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kaca Tikungan	Unit	79	79	79	79	79
2	Warning Light	Unit	5	5	5	5	5
3	Traffic Light	Unit	-	-	-	-	-
4	Rambu-rambu	Unit	324	324	324	342	415
5	Guadril	Unit	163	163	163	123	167
6	Deliniatur	Unit	272	272	272	100	100
7	Trapikun	Unit	100	100	100	100	100
8	Marka Jalan	M ²	1650	1650	1650	1650	1650
9	Penyebrangan	Unit	-	-	-	-	-
10	Papan Penunjuk Arah	Buah	5	5	5	5	6
11	Papan Informasi Lalu Lintas	Buah	5	5	5	5	6

Sumber: Kantor Perhubungan Kota Sawahlunto

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana lalu lintas di Kota Sawahlunto dalam upaya mewujudkan visi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya selalu terus ditingkatkan, Rambu-rambu lalu lintas dari 324 unit di tahun 2008 meningkat menjadi 415 unit pada tahun 2012, guadril juga mengalami peningkatan dari 163 unit di tahun 2008 menjadi 167 unit di tahun 2012, papan penunjuk arah dan informasi lalu lintas tahun 2008 sebanyak 5 buah dan tahun 2012 bertambah menjadi 6 buah, sedangkan jumlah deliniatur juga berkurang dari 272 unit menjadi 100 unit di tahun 2012. Ketersediaan sarana lalu lintas ini dirasakan masih kurang sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh jalan. Selain sarana transportasi diatas, di Kota Sawahlunto juga terdapat 3 (tiga) buah stasiun Kereta Api. Panjang lintasan kereta api yang

menghubungkan Pusat Kota Sawahlunto, Muaro Kalaban dan Silungkang ini mencapai 18 (delapan Belas) Km. Kedepannya, Pemerintah Kota Sawahlunto mendukung semua kebijakan PT. KAI dalam mengembangkan sarana transportasi ini. Saat ini, sarana angkutan massal ini tidak beroperasi lagi sebagai alat transportasi umum, akan tetapi pihak Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan PT. KAI Cabang Sawahlunto telah menyepakati Kereta Api yang ada digunakan sebagai kereta api Wisata dengan stasiun utamanya di Pusat Kota dijadikan sebagai Museum Kereta api.

C. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan

NO	PELAYANAN DASAR			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM TAHUN 2012 (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)			
1	2	3	4	5	6	7
I	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jalan kabupaten / Kota	75	50	2014	-25	Belum tercapai
	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/ Kota	60	60	2014	0	Terpenuhi
	Tersedianya Halte pada setiap Kabupaten / Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100	10	2014	-90	Belum tercapai
	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten /Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100	100	2014	0	Terpenuhi
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada	60	20	2014	-40	Belum tercapai

NO	PELAYANAN DASAR			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM TAHUN 2012 (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)			
1	2	3	4	5	6	7
	jalan Kabupaten/Kota					
VI	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	60	0	2014	-60	Belum dilaksanakan
VII	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal	50	0	2014	-50	Belum dilaksanakan
VIII	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100	100	2014	0	Terpenuhi
IX	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota	40	20	2014	-20	Belum tercapai
X	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kalaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100	30	2014	-70	Belum tercapai
XI	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota	100	100	2014	0	Terpenuhi

2.3.1.18 Komunikasi informasi

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik

cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator kinerja tabel berikut;

TABEL 2.65
LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Kantor Pos (unit)	4	4	4	4	4
2	Jumlah Sambungan Telepon (SST)	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
3	Jumlah Warnet (unit)	27	27	27	27	45

Sumber : Bappeda Kota Sawahlunto

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kantor Pos di Kota Sawahlunto sebanyak 4 unit sementara itu jumlah Warnet pada tahun 2008 sebanyak 27 unit mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 45 unit.

2.3.1.19 Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikaasi dan Informasi

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informasi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET CAPAIAN SPM (%)		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA	
	INDIKATOR		CAPAIAN SPM 2012				
			%				
1	2	3	4	5	6	7	
I	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional						
	I.1	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui: a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12 x /tahun	8 x/tahun	2014	(4 x /tahun)	Belum tercapai
	I.2	b. Media baru seperti website (media online);	Setiap hari	Setiap hari	2014	Terpenuhi	Terpenuhi
	I.3	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12 x /tahun	0	2014	Tidak ada data	Tidak ada data
	I.4	d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya	12 x /tahun setiap kecamatan	9 x /tahun setiap kecamatan	2014	(3 x/tahun)	Belum tercapai

NO		JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET CAPAIAN SPM (%)		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
		INDIKATOR		CAPAIAN SPM 2012			
				%			
1	2		3	4	5	6	7
	1.5	e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	12 x /tahun	8 x /tahun	2014	(4 x /tahun)	Belum tercapai
II		Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)					
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	15%	2014	-35%	Belum tercapai

2.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.3.2.1 Pertanian

Padi merupakan komoditas pertanian tanaman pangan utama di kota Sawahlunto dan senantiasa menjadi salah satu subsector andalan yang menyerap cukup banyak tenaga kerja. Secara alami luas lahan sawah di kota Sawahlunto akan berkurang karena alih fungsi lahan sedangkan pencetakan lahan baru tidaklah memungkinkan, karena itu peningkatan produktivitas merupakan satu satunya pilihan untuk menaikkan produksi padi.

Perkembangan produktivitas lahan sawah dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 2.67
PRODUKTIVITAS PADI PER HEKTAR KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012

NO	PRODUKTIVITAS PADI	2008	2009	2010	2011	2012
1	Produksi tanaman padi (Ton)	12.370	11.689	13.523	12.397	13.928
2	Luas panen tanaman padi (ha)	2.577	2.329	2.770	2.473	3.273.
3	Produktivitas padi (Ton/Ha)	4,8	5,01	4,88	5,01	4,26

Sumber : BPS 2012

Produktivitas tanaman padi per hektar kota Sawahlunto setiap tahunnya dari tahun 2008-2011 selalu berada pada angka diatas 4,8 ton/ha, namun pada tahun 2012 produktivitas padi perhektar mengalami penurunan pada angka

4,26 ton/ha. Pada sub sector perkebunan program pendistribusian bibit gratis dari pemerintah telah menjadikan komoditas karet dan kakao sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat khususnya di wilayah pedesaan yang masih memiliki lahan potensial untuk usaha perkebunan.

Sebagai salah satu sector andalan maka sub sector tanaman pangan dan sub sector perkebunan selalu memberikan kontribusi yang semakin besar perkembangan ekonomi kota yang tercermin dalam PDRB sebagai berikut :

TABEL 2.68
KONTRIBUSI SUB SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN TERHADAP PDRB
TAHUN 2008-2012

NO	PDRB	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman pangan dan hortikultura)					
	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)	43.951,59	50.010,23	56.778,58	65.407,96	76.635,39
	Total PDRB (Juta)	861.957,22	984.252,63	1.121.634,47	1.274.070,67	1.425.280,34
	Kontribusi (%)	5,10	5,08	5,06	5,13	5,38
2	Jumlah Kontribusi Sektor Perkebunan					
	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)	4.057,82	4.692,57	7.117,58	7.725,67	8.057,46
	Total PDRB (Juta)	861.957,22	984.252,63	1.121.634,47	1.274.070,67	1.425.280,34
	Kontribusi (%)	0,47	0,48	0,63	0,61	0,57

Sumber : Buku PDRB 2012

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang nyata kepada PDRB Kota Sawahlunto yakni melalui sub sektor tanaman pangan dan hortikultura sebesar Rp. 43.951,59 juta atas dasar harga berlaku pada tahun 2008. Angka ini terus beranjak naik setiap tahun, hingga tahun 2012 mencapai Rp. 76.635,39 juta atas dasar harga berlaku. Pada sub sektor perkebunan, peningkatan juga terjadi sangat pesat, tahun 2008, kontribusi sub sector ini sebesar Rp. 4.057,82 juta dan tahun 2012 mencapai Rp. 8.057,46 juta.

2.3.2.2 Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor energy dan sumberdaya mineral terutama didukung oleh keberadaan pertambangan batubara, namun menipisnya cadangan batubara pada tambang terbuka sangat mempengaruhi terhadap produksi batubara yang cenderung menurun, meskipun secara nominal nilai PDRB sector ini terus meningkat sebagaimana terlihat pada table berikut :

TABEL 2.69
KONTRIBUSI SUB SEKTOR NON MIGAS TERHADAP PDRB KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012

NO	PDRB	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Kontribusi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Non Migas)					
	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)	104.895,98	123.488,84	123.687,57	120.997,59	118.413,11
	Total PDRB (Juta)	861.957,22	984.252,63	1.121.634,47	1.274.070,67	1.425.280,34
	Kontribusi (%)	12,17	12,55	11,03	9,50	8,31

Sumber : PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2012

Kontribusi yang diberikan oleh sektor energi dan sumber daya mineral untuk sub sektor non migas cukup besar, yakni sebesar Rp. 104.895,98 juta pada tahun 2008, dan terus meningkat hingga menjadi Rp. 118.413,11 juta pada tahun 2012, namun peranan sector ini semakin berkecil dari 12,17% tahun 2008 menjadi hanya 8,31% tahun 2012.

2.3.2.3 Pariwisata

Pembangunan industri pariwisata kota Sawahlunto merupakan wujud dari keinginan untuk mencapai visi kota "Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya" , karena itu semua sector pembangunan lain diarahkan guna menunjang percepatan pembangunan pariwisata. Inovasi dan kreativitas menjadi factor utama keberhasilan sector ini disamping potensi alam yang tersedia, karena konsep "Heritage Tourisme" menjadi unggulan dan pembeda kota Sawahlunto dengan daerah tujuan wisata lain. Perkembangan kepariwisataan Kota Sawahlunto dapat terlihat angka kunjungan wisatawan sebagai berikut :

TABEL 2.70
KUNJUNGAN WISATA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012

NO	OBJEK WISATA	JUMLAH KUNJUNGAN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Wisata Ziarah	2.320	8.185	9.952	11.247	*
2	Museum Gudang Ransum	6.250	6.381	5.640	8.014	9.359
3	Museum Kereta Api	978	2.069	2.477	2.569	4.034
4	Air Dingin / Waterboom	201.800	157.436	150.392	167.073	170.305
5	Kereta Api Wisata	-	40.456	42.854	38.648	*
6	Wisata MICE / Convensi	4.947	34.231	36.489	48.379	249.870

NO	OBJEK WISATA	JUMLAH KUNJUNGAN				
		2008	2009	2010	2011	2012
7	Taman Satwa Kandi	83.543	85.139	128.084	279.958	302.566
8	Even Pacu Kuda	175.000	192.000	169.601	25.000	*
9	Kereta Api Mak Itam	-	7.641	8.281	1.960	1.500
10	Even Motocross / Roadrace	12.356	58.865	63.123	92.464	*
11	Lobang Mbah Soero	1.330	3.307	2.801	3.891	*
12	Desa wisata rantih	-	-	865	907	3.447
13	Makan bajamba	-	-	16.000	20.000	*
14	Simfest	-	-	9.000	17.000	*
15	Pekan Muharam	-	-	3.000	12.000	*
16	Hotel/Penginapan	-	-	4.742	7.875	5.617
	Jumlah (Jiwa)	488.524	595.710	653.301	736.985	746.698

Sumber : SDA 2012

Ket : *) Digabungkan ke Wisata MICE

Satu hal yang membanggakan karena sejalan dengan visi kota sawahlunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya, maka jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata kota sawahlunto selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2008 total pengunjung sebanyak 488.524 jiwa, dan pada tahun 2012, jumlah kunjungan menjadi hampir dua kali lipat yakni sebanyak 746.698 jiwa.

2.3.2.4 Kelautan dan Perikanan

Potensi bagi pengembangan perikanan di Kota Sawahlunto sangat terbatas akibat ketersediaan air bagi budidaya perikanan sangat kecil. Pada sisi lain seiring perkembangan jumlah penduduk kebutuhan atas ikan terus meningkat sehingga ketersediaan ikan produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan. Berikut ini perkembangan produksi dan konsumsi ikan tahun 2008-2012.

TABEL 2.71
KONSUMSI IKAN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012

NO	KONSUMSI IKAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah produksi ikan (ton)	105,29	154,3	134,7	112,3	103,66
2	Jumlah target daerah produksi ikan (ton)	105	107	107	109	109
3	Jumlah Konsumsi Ikan (ton)	4.728	5.215	5.842	2.078	2.861

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Kecilnya produksi ikan juga menyebabkan kontribusi sub sector ini terhadap PDRB juga sangat kecil sebagaimana terlihat tabel berikut :

TABEL 2.72
KONTRIBUSI SUB SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PDRB
TAHUN 2008-2012

NO	PDRB	2008	2009	2010	2011	2012
1	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)	857,93	1.173,67	1.252,54	1.311,59	1.497,13
2	Total PDRB (Juta)	861.957,22	984.252,63	1.121.634,47	1.274.070,67	1.425.280,34
3	Kontribusi (%)	0,10	0,12	0,11	0,10	0,11

Sumber : PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2012

2.3.2.5 Perdagangan

Perkembangan sektor perdagangan sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi pada sector lain terutama sector pertanian, industry, pertambangan dan sumberdaya mineral serta perkembangan di bidang pariwisata. Perkembangan pesat di bidang kepariwisataan menumbuhkan banyak usaha penunjang lainnya seperti hotel dan restoran yang berkontribusi terhadap sector perdagangan.

Perkembangan kontribusi sektor Perdagangan, hotel dan restoran, dalam PDRB selama 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.73
KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PDRB
TAHUN 2008-2012

NO	KONTRIBUSI	2008	2009	2010	2011	2012
1	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)	97.326,75	117.389,34	135.962,98	157.427,40	178.670,59
2	Total PDRB (Juta)	861.957,22	984.252,63	1.121.634,47	1.274.070,67	1.425.280,34
3	Kontribusi (%)	11,29	11,93	12,12	12,36	12,54

Sumber : PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2012

Dari tabel diatas, terlihat bahwa atas dasar harga berlaku, selama lima tahun semenjak tahun 2008 hingga 2012, jumlah kontribusi dari sektor perdagangan, hotel dan restoran selalu meningkat baik itu dari jumlah maupun persentasenya.

2.3.2.6 Industri dan Ketransmigrasian

Sektor industry di kota Sawahlunto didominasi oleh industry kecil pada skala rumah tangga dengan berbagai produk yang dihasilkan. Salahsatu produk

andalan adalah kerajinan songket yang dikerjakan menggunakan alat tenun bukan mesin yang berkembang sangat pesat seiring perkembangan sector pariwisata. Perkembangan kontribusi sector industry terhadap PDRB selama tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.74
KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB
TAHUN 2008-2012

NO	KONTRIBUSI	2008	2009	2010	2011	2012
1	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)	91.546,17	108.799,80	127.256,28	145.486,87	157.232,03
2	Total PDRB (Juta)	861.957,22	984.252,63	1.121.634,47	1.274.070,67	1.425.280,34
3	Kontribusi (%)	10,62	11,05	11,35	11,42	11,03

Sumber : PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2012

Dari tabel, terlihat bahwa kontribusi atas dasar harga berlaku dari sektor industri sub sektor industri tanpa migas selalu meningkat dari tahun 2008-2012.

Peningkatan kontribusi ini didukung oleh perkembangan jumlah unit usaha industry sebagaimana terlihat pada table berikut :

TABEL 2.75
JUMLAH INDUSTRI DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2012

NO	INDUSTRI	JUMLAH UNIT USAHA	NILAI PRODUKSI/ OMSET
1	Industri Kecil (industri makanan dan kerajinan)	715	Rp. 61.208.759.000,-
2	Industri Menengah	4	Rp. 3.755.086.000,-

Sumber : Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto 2013

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Kondisi Kota Sawahlunto terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari : kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ Infrastruktur dan iklim berinvestasi.

2.4.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

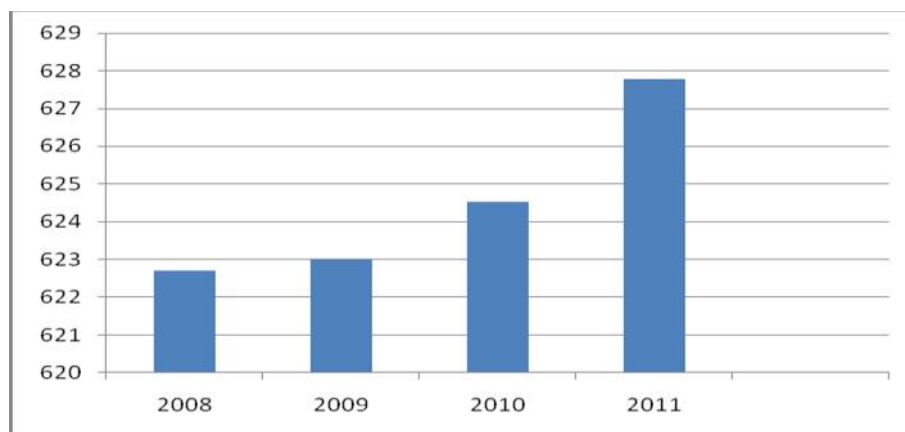
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan pengaruh bagi peningkatan daya saing daerah.

Kondisi Kota Sawahlunto terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari : pengeluaran perkapita atau angka konsumsi rata-rata perkapita (pangan dan non pangan), dan produktivitas total daerah.

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pada tahun 2011 pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga perkapita di Kota Sawahlunto mencapai Rp. 627.790,-. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga perkapita selalu meningkat dari tahun ketahun. Semakin naik angka konsumsi rumah tangga, itu menunjukkan semakin besar pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GRAFIK 2.10
ANGKA KONSUMSI RATA-RATA RUMAH TANGGA PERKAPITA DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2011 (RIBU RUPIAH)



Sumber : BPS Kota Sawahlunto

2.4.1.2. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Hal ini tergambar melalui PDRB atas dasar harga berlaku. Dari ke-9

sektor/ lapangan usaha tersebut, yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sawahlunto adalah sektor/ lapangan usaha jasa-jasa, dan yang kontribusinya paling kecil sektor listrik, gas dan air bersih.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas total daerah persektor/lapangan usaha (ADH Berlaku) di Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2008-2012.

TABEL 2.76
PRODUKTIVITAS TOTAL DAERAH PER SEKTOR (ADH BERLAKU) DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012 (JUTAAN RUPIAH)

NO	SEKTOR/ LAPANGAN USAHA	2008		2009		2010		2011		2012*	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian	78.744,32	9,14	95.737,53	9,73	114.674,06	10,22	128.625,09	10,10	150.159,47	10,54
2.	Pertambangan dan Pengalihan	168.865,75	19,59	160.673,40	16,32	145.441,82	12,97	142.785,18	11,21	137.838,78	9,67
3.	Industri Pengolahan	91.546,17	10,62	108.799,80	11,05	127.256,28	11,35	145.486,87	11,42	157.232,03	11,03
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	9.485,99	1,10	13.229,45	1,34	14.868,37	1,33	16.074,17	1,26	18.335,35	1,29
5.	Bangunan	62.583,08	7,26	72.848,12	7,40	97.058,15	8,65	114.587,98	8,99	131.827,83	9,25
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	97.326,75	11,29	117.389,34	11,93	135.962,98	12,12	157.427,40	12,36	178.670,59	12,54
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	91.142,76	10,57	105.501,81	10,72	120.705,52	10,76	141.063,59	11,07	159.462,06	11,19
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	45.719,58	5,30	52.049,52	5,29	61.504,16	5,48	69.889,56	5,49	78.785,96	5,53
9.	Jasa-Jasa	216.542,83	25,12	258.023,66	26,22	304.163,13	27,12	358.130,30	28,11	412.968,27	28,97
PDRB		861.957,23		984.252,63		1.121.634,47		1.274.070,14		1.425.280,34	

Sumber : PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2012

Pada tahun 2012 secara nominal kontribusi sektor jasa-jasa tetap merupakan sektor ekonomi yang paling nilai tambahnya dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, yang mencapai Rp. 412.968.270.000,- (28,97%). Bila dibandingkan dengan kurun waktu 2008-2011 mengalami kenaikan rata-rata 1% dari PDRB tahun bersangkutan. Posisi berikutnya di tempati oleh sektor/

lapangan usaha perdagangan, Hotel dan Restoran dengan nilai sebesar Rp. 178.670.590.000,- meningkat dibanding tahun 2011 yang jumlahnya sebesar Rp. 157.427.400.000,-. Sektor/lapangan usaha industri pengolahan menduduki urutan ketiga dalam kontribusinya terhadap Kota Sawahlunto, yakni dari Rp. 145.486.870.000,- pada tahun 2011 menjadi Rp. 157.232.030.000,- pada tahun 2012.

2.4.2. FOKUS IKLIM BERINVESTASI

2.4.2.1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas mempengaruhi investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah. Semakin rendah angka kriminalitas pada suatu daerah maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut. Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto dapat dijelaskan seperti tabel di bawah ini :

TABEL 2.77
ANGKA KRIMINALITAS DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012

No	Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Curat (Pencurian dan pemberatan)	24	38	9	21	43
2.	Penggelapan	6	9	2	3	3
3.	KDRT	3	8	8	2	5
4.	Penipuan	9	6	4	5	10
5.	Pengrusakan	4	5	1	6	7
6	Curanmor	4	3	7	8	17
7	Pembakaran/kebakaran	7	1	2	2	1
8	Anirat (Penganiayaan, pemberatan)	9	3	5	0	10
9	Curas (pencurian dengan pemerasan)	2	1	0	0	3
10	Perkosaan/cabul	3	1	2	4	8
11	Pembunuhan	0	0	0	0	0
*	Total jumlah tindak kriminal 1 tahun	71	75	40	51	107
**	Jumlah penduduk	54.913	55.291	56.866	57.567	58.068
	Angka kriminalitas (*)/(**) per 1.000 jumlah penduduk	1,29	1,36	0,68	0,89	0,184

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Angka Kriminalitas selama periode 2008-2011 memperlihatkan penurunan yang cukup tajam dari 1,29 menjadi 0,68 namun tahun 2012 kembali meningkat menjadi 1,84, yang didominasi oleh kasu pencurian dan pemberatan dan kasus pencurian kendaraan bermotor.

2.4.2.2. Jumlah Demo

Jumlah investasi yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah juga dipengaruhi oleh keamanan suatu daerah, yang salah satu indikatornya adalah jumlah demonstrasi. Semakin rendah jumlah demonstrasi pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanam investasi di daerah tersebut. Di Kota Sawahlunto jumlah demonstrasi yang terjadi dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.78
JUMLAH DEMOSTRASI DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012

No	Jumlah demo dalam satu tahun	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah demonstrasi	-	-	2	2	-

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

2.4.2.3. Lama Proses Perizinan

Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi. Jenis perizinan yang ditangani Kota Sawahlunto pada tahun 2012 terdiri antara lain : izin usaha perdagangan (SIUP), TDP, TDI, IMB, HO, IUP, IUJP, Izin Pengumpulan Bahan Tambang Industri, Izin Penumpukan Bahan Bakar Industri, Reklame dll. Lamanya waktu untuk pengurusan izin tersebut serta biaya resmi dalam mengurus izin tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.79
LAMA PROSES DAN BIAYA PERIZINAN DI KOTA SAWAHLUNTO
PADA TAHUN 2012

No	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Biaya
1	SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	1 Hari	Tanpa biaya
2	TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	1 Hari	Tanpa biaya
3	TDI (Tanda Daftar Industri)	1 Hari	Tanpa biaya
4	IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	7 Hari	Sesuai Perda
5	HO (Izin Gangguan)	10 Hari	Sesuai Perda
6	IUP (Izin Usaha Pertambangan)	30 Hari	Tanpa biaya
7	IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan)	30 Hari	Tanpa biaya
8	Izin Pengumpulan Bahan Tambang Industri	30 Hari	Tanpa biaya
9	Izin Penumpukan Bahan Bakar Industri	30 Hari	Tanpa biaya
10	Reklame	7 Hari	Sesuai Perda

Sumber : Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto memberikan kemudahan kepada orang pribadi ataupun perusahaan dalam proses pengurusan perizinan yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi yang diperlukan dan sebagian besar dari proses perizinan tersebut tidak dipungut biaya seperti pengurusan SIUP,TDP,TDI dan lainnya.

2.4.2.4. Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan perusahaan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan/perusahaan.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah realisasi serta macam pajak dan retribusi di Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2008 – 2012 :

TABEL 2.80
JUMLAH REALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012 (Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Pajak Daerah	1.535.693.645,-	1.595.546.610,-	1.932.701.833,-	2.320.146.288,-	2.969.920.454,-
	Pajak Hotel	31.379.546,-	30.067.925,-	33.195.768,-	27.700.167,-	89.961.390,-
	Pajak Restoran	448.773.864,-	443.512.934,-	457.767.176,-	565.254.594,-	580.219.684,-
	Pajak Hiburan	10.785.850,-	7.645.000,-	200.760.450,-	249.466.600,-	484.108.100,-
	Pajak Reklame	42.381.925,-	31.145.481,-	29.866.489,-	40.284.352,-	41.303.357,-
	Pajak Penerangan Jalan	952.643.103,-	1.058.779.295,-	1.190.329.195,-	1.371.716.755,-	1.475.439.589,-
	Pajak Parkir	-	-	3.948.500,-	1.661.400,-	2.610.160,-
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	49.729.357,-	24.395.975,-	16.834.255,-	42.810.120,-	8.084.734,-
	Pajak BPHTB	-	-	-	21.252.300,-	288.193.440,-
2	Jumlah Retribusi Daerah	13.611.889.452,-	13.891.964.054,-	11.781.537.158,-	3.822.298.255,-	2.295.581.904,-
	Retribusi Jasa Umum	9.811.243.365,-	10.423.814.730,-	9.743.779.557,-	1.099.628.057,-	1.432.525.135,-
	Retribusi Jasa Usaha	3.065.846.487,-	2.789.965.224,-	1.942.703.023,-	2.630.251.698,-	804.185.308,-
	Retribusi Perizinan Tertentu	734.799.600,-	678.184.100,-	95.054.578,-	92.418.500,-	58.871.461,-
3	Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak (PBB, PPh ps1 21, PPh 25/29, HPH, Eksplorasi dan Eksploitasi dll	15.213.304.412,-	15.213.304.412,-	18.462.028.627,-	22.708.276.757,-	28.439.344.012,-

Sumber : DPPKAD Kota Sawahlunto

Dari tabel diatas dapat terlihat rata-rata pertumbuhan pajak daerah dari kurun waktu 2008 – 2012 sebesar 18,28 %, dimana tahun 2008 pajak daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp. 1.535.693.645,- menjadi Rp. 2.969.920.454,- pada tahun 2012, hal disebabkan oleh kenaikan pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak hiburan.

Penerimaan retribusi daerah selama kurun waktu 2008 – 2012 sangat menurun dari tahun 2008 sebesar Rp. 13.611.889.452,- berkurang menjadi Rp. 2.295.581.904,- tahun 2012 atau tumbuh minus 83,1%. Penurunan yang signifikan terjadi pada retribusi jasa umum dimana RSUD Kota Sawahlunto menjadi BLUD

sehingga pencatatan retribusi pelayanan kesehatan dari RSUD dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan dana bagi hasil pajak/bukan pajak untuk tahun 2008 sebesar Rp. 15.213.304.412,- meningkat menjadi Rp. 28.439.344.012,- pada tahun 2012, atau sebesar 87%., yang disebabkan meningkatnya bagi hasil pajak penghasilan, bagi hasil iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty).

2.4.2.5. Persentase Desa yang Berstatus Swasembada

Berdasarkan statusnya desa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni Swadaya (tradisional), Swakarya (transisional) dan desa Swasembada (berkembang). Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri : daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antarmanusia sangat erat dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah : kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi, desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian, telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain, alur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada : kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan, penduduknya padat-padat, tidak terikat dengan adat istiadat, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain dan partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

Berikut disajikan data mengenai jumlah desa swadaya, swakarya dan swasembada di Kota Sawahlunto tahun 2008 – 2012.

TABEL 2.81
PERSENTASE DESA BERSTATUS SWASEMBADA TERHADAP TOTAL DESA
DI KOTA SAWAHLUNTO

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Desa Swadaya	-	-	-	-	-
2	Jumlah Desa Swakarya	27	27	27	27	27
3	Jumlah Desa Swasembada	-	-	-	-	-
4	Jumlah Desa (1+2+3)	27	27	27	27	27
5	Persentase Desa Berstatus Swasembada Dibagi Jumlah Desa(3 / 4)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Sumber : Kantor PMPKB

Dari uraian dan tabel diatas terlihat bahwa dari kurun waktu 2008 – 2012 desa yang ada di Kota Sawahlunto tidak memiliki desa yang berstatus desa swadaya hanya ada desa swakarya yang dalam proses menuju desa swasembada.

2.4.2.6. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum

Tabel 2.82
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum

NO		PELAYANAN DASAR			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KESENJANGAN /GAP (%)	KRITERIA
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM (%)	CAPAIAN SPM 2012 (%)			
1		2	3	4	5	6	
I		Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat					
	I.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	50	1,7	2015	-48,3	Belum Tercapai
	I.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	70	26	2010	-44	Belum Tercapai

2.4.3. FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

2.4.3.1. Luas Wilayah Produktif

TABEL 2.83
LUAS WILAYAH PRODUKTIF
TAHUN 2008-2012

TAHUN	LUAS WILAYAH PRODUKTIF (HA)
2008	15.250
2009	15.250
2010	15.250
2011	15.330
2012	15.330

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2012

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa sejak 2008 luas wilayah produktif di kota Sawahlunto tidaklah mengalami banyak perubahan sampai tahun 2012 pada kisaran 15.330 Ha.

2.4.3.2. Luas Wilayah Industri

TABEL 2.84
LUAS WILAYAH INDUSTRI
TAHUN 2008-2012

Tahun	Luas Wilayah Industri (ha)
2008	70
2009	70
2010	70
2011	70
2012	70

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2012

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa sejak 2008 luas wilayah industri di kota Sawahlunto tidaklah mengalami banyak perubahan sampai tahun 2012 pada kisaran 70 Ha.

2.4.3.3. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Menurut fungsinya, bank dibagi 2 (dua) bagian, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat dan berdasarkan kegiatan usahanya bank dibagi menjadi : bank konvensional dan bank syariah.

TABEL 2.85
JENIS, JUMLAH BANK SERTA KANTOR PELAYANAN DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2012

NO.	URAIAN	2012
1.	Bank Umum	9
	1.1. Konvensional	7
	1.2. Syariah	2
2.	BPR	6
	2.1. Konvensional	5
	2.2. Syariah	1
Jumlah		15

Sumber : Profil Kota Sawahlunto Tahun 2012

Pada tahun 2012, jumlah bank umum di Kota Sawahlunto seluruhnya berjumlah 9 unit, terdiri dari; 7 unit bank umum konvensional dan 2 unit bank umum syariah. Adapun jumlah bank perkreditan rakyat (BPR) seluruhnya berjumlah 6 unit, terdiri dari 5 unit BPR konvensional dan 1 unit BPR syariah.

2.4.3.4. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Ketersediaan restoran dan rumah makan pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkan.

TABEL 2.86
JUMLAH RESTORAN DAN RUMAH MAKAN DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2012

No.	Uraian	2012
1.	Restoran	0
2.	Rumah Makan/ Cafe sejenisnya	56

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto

Rumah makan yang tersedia di Kota Sawahlunto pada umumnya belum memenuhi standar restoran yang ditentukan PHRI, sehingga belum dapat dikatakan sebagai restoran.

2.4.3.5. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Ketersediaan penginapan sangat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian suatu daerah, banyaknya penginapan dapat menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi pada suatu daerah selengkapnyanya ketersediaan penginapan dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 2.87
JENIS, KELAS DAN JUMLAH PENGINAPAN/ HOTEL DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012

NO.	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Hotel Bintang 5	0	0	0	0	0
2.	Hotel Bintang 4	0	0	0	0	0
3.	Hotel Bintang 3	0	0	0	0	0
4.	Hotel Bintang 2	0	0	0	1	1
5.	Hotel Bintang 1	0	0	0	0	0
6.	Hotel Non Bintang dan Penginapan lainnya	69	69	69	69	69
	Jumlah	69	69	69	70	70

Sumber : Buku Profil Kota Sawahlunto Tahun 2012

Pada tahun 2012 jumlah penginapan di Kota Sawahlunto sebanyak 70 buah, terdiri dari ; hotel bintang dua sebanyak 1 unit dan hotel non bintang dan penginapan lainnya sebanyak 69 unit. Kondisi ini cenderung tetap dibandingkan kondisi tahun sebelumnya sebanyak 70 unit, yang terdiri dari hotel bintang 2 sebanyak 1 unit dan hotel non bintang dan penginapan lainnya sebanyak 69 unit. Pada tahun 2008 sampai 2010 total jumlah penginapan di Kota Sawahlunto sebanyak 69 unit, yaitu hotel non bintang dan penginapan lainnya sebanyak 69 unit.

2.4.3.6. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Sarana pendukung dalam peningkatan aksesibilitas daerah antara lain adalah jalan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian kota. Infrastruktur

jaringan transportasi yang tersedia di Kota Sawahlunto meliputi berbagai akses perhubungan yang menghubungkan Kota Sawahlunto ke kota dan kabupaten tetangga dan kemudahan akses perhubungan antar kecamatan, antar desa/kelurahan bahkan ke sentra produksi.

Dilihat dari kondisi Georafis Kota Sawahlunto merupakan jalur lintas Sumatera yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi. Kota Sawahlunto memiliki panjang jalan 502,62 km yang terdiri dari jalan kota 440,29 km, jalan nasional 35,24 km dan jalan propinsi 4,65 km dengan kondisi jalan yang terus meningkat untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat kota, dan selengkapny dapat dilihat pada tabel rasio panjang jalan berikut ini.

TABEL 2.88
RASIO PANJANG JALAN DAN JUMLAH KENDARAAN
TAHUN 2008-2012

NO.	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Panjang Jalan Kota (km)	440.29	440.29	440.29	440.29	440.29
2	Panjang Jalan Nasional (km)	8.15	8.15	30.59	30.59	30.59
3	Panjang Jalan Propinsi (km)	27.09	27.09	4.65	4.65	4.65
4.	Jumlah Kendaraan (unit)	9.637	11.419	12.112	13.222	14.038
5.	Rasio Jalan Kota	0.045	0.038	0.036	0.033	0.031

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Untuk kemudahan akses transportasi di Kota Sawahlunto terdapat 2 buah terminal tipe C yang dapat membantu dalam kemudahan akses transportasi di Kota Sawahlunto. Jika dilihat dari rasio panjang jalan mengalami penurunan 0,045 di tahun 2008 menjadi 0,031 tahun 2012 berarti untuk satu unit kendaraan rata-rata tersedia jalan sepanjang 31 meter.

2.4.3.7. Ketaatan Terhadap RTRW

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto 2012-2032 yang mana Pola Ruang terdiri dari Kawasan Lindung Dan Kawasan Budidaya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.89
KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDIDAYA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2012

NO	POLA RUANG	LUAS (HA)
I	Kawasan Lindung	209.86
1	Daerah Hijau	936.66
2	Danau	28.98
3	Hutan Lindung	72.71
4	Taman	14.49
6	RTH taman	37.06
7	Hutan Kota Kolok	70.00
8	Hutan Kota	1,074.79
II	Kawasan Budidaya	25,110.32
1	Sawah	1.772
2	Tambang	2,024.08
3	Hutan Produksi	6,802.48
4	Hutan Produksi Konversi	4,113.18
5	Pemukiman	3,461.90
6	Pendidikan Tinggi	19.14
7	Perkantoran	127.48
8	Pertanian Lahan Kering	6,039.36
9	Wisata Kandih	400.00
10	TPA	25.54
	Total	27,345.00

Sumber: RTRW Kota Sawahlunto

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan strategis di Kota Sawahlunto, meliputi :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

Desa Muara Kalaban, Kecamatan Silungkang ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional didukung oleh pengembangan terminal Tipe B dan terminal bongkar muat barang
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - Kawasan Kota Lama, Kecamatan Lembah Segar sebagai kawasan pelestarian budaya atau cagar budaya;
 - Kawasan rencana pusat pemerintahan di Kawasan Kolok dan Sijantang, guna peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan identitas kota

- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- d. Kawasan Kandih, Kecamatan Barangin untuk pengembangan wisata

2.4.3.8. Luas Wilayah Kekeringan

Wilayah kekeringan umumnya terdapat di daerah perbukitan Kecamatan Silungkang dan Kecamatan Barangin serta di daerah yang tidak memiliki sumber air permukaan seperti di Bukit Gadang, Batu Tanjung, Tumpuk Tengah, Datar Mansiang dan Kumbayau.

2.4.3.9. Luas Wilayah Kebanjiran

Topografi wilayah kota yang ada dengan tingkat kemiringan rata-rata diatas 15 %, tidak memungkinkan terjadi banjir di suatu kawasan karena kecepatan aliran air sangat tinggi.

Hanya saja terdapat beberapa kawasan yang tergenang disebabkan luapan sungai yang ada disekitar kawasan antara lain seperti sepanjang aliran sungai Batang Lasi di Silungkang Duo dan Silungkang Tigo, sepanjang aliran batang Ombilin di TaLawi Hilir dan Sijantang.

2.4.3.10. Luas Wilayah Perkotaan

Wilayah perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi. untuk lebih jelasnya luas wilayah perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.90
LUAS WILAYAH PERKOTAAN
TAHUN 2012

NO	NAMA WILAYAH PERKOTAAN	LUAS (Km2)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
I	KECAMATAN LEMBAH SEGAR		6.837
1	Pasar	0,50	1.497
2	Kubang Sirakuk Utara	0,28	954
3	Kubang Sirakuk Selatan	0,27	1.094
4	Aur Mulyo	0,20	1.107

NO	NAMA WILAYAH PERKOTAAN	LUAS (Km2)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
5	Tanah Lapang	0,16	1.218
6	Air Dingin	0,14	967
II	KECAMATAN BARANGIN		7.227
1	Saringan	0,81	1.747
2	Lubang Panjang	1,00	1.258
3	Durian I	1,17	2.179
4	Durian II	1,25	2.043
	Total	5.78	14.064

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Luas wilayah perkotaan dibanding dengan luas wilayah kota adalah sebesar 2,11% dengan total jumlah penduduk sebanyak 14.064 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan utama masyarakat kota Sawahlunto masih bertumpu pada sektor pertanian yang berada di wilayah pedesaan yang mencakup 97,89% dari luas wilayah kota. Namun apabila melihat tingkat perkembangan kegiatan pembangunan sepuluh tahun belakangan ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan dan jasa sudah sangat meningkat di wilayah pinggiran perkotaan seperti Muaro Kalaban, Santur, Talawi Hilir, Sijantang.

2.4.3.11. Persentase RT yang Menggunakan Air Bersih

Dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih, masyarakat memiliki keragaman akses terhadap sumber air sesuai dengan kemampuan aksesibilitasnya dan ketersediaan sarana dan prasarannya. Sistem penyediaan air minum yang digunakan rumah tangga dapat dibedakan menjadi sistem perpipaan (unit air baku, unit produksi, transmisi, dan distribusi) dan sistem non-perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air). Selengkapny cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.91
PERSENTASE PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN AKSES AIR MINUM
TAHUN 2008-2012

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Rumah Tangga	14.374	13.891	14.051	14.209	17.642
2	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih	7.994	9.156	9.987	10.581	15.040
3	Persentase	55,61	65,91	71,08	74,47	85,25

Sumber : Bappeda 2012

Proporsi rumah tangga dengan akses air bersih dengan adanya berbagai program yang telah digulirkan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terus mengalami peningkatan yaitu 55,61% tahun 2008, menjadi 85,25% pada tahun 2012. Capaian ini sudah melewati target MDGs tahun 2015 yaitu sebesar 68,5%, namun dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas masih perlu ditingkatkan.

2.4.3.12. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Ketersediaan daya listrik di Kota Sawahlunto hingga saat ini disediakan oleh PT.PLN dalam suatu jaringan terkoneksi pada sistem kelistirikan Sumatera dimana termasuk didalamnya PLTU Ombilin yang berkapasitas terpasang 2 x 100 mw.

2.4.3.13. Persentase RT yang Menggunakan Listrik

Pada saat ini listrik merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pemakaian listrik setiap tahunnya seperti tabel berikut;

TABEL 2.92
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN LISTRIK
TAHUN 2008-2012

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	14.374	13.891	14.051	14.209	15.247
2	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik (RT)	11.024	12.632	13.425	13.619	
3	Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	76,69	90,94	95,54	95,85	

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat dari 76,69% pada tahun 2008 menjadi 95,85% pada tahun 2011, hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat sekitar 4,15% rumah tangga yang belum teraliri aliran listrik.

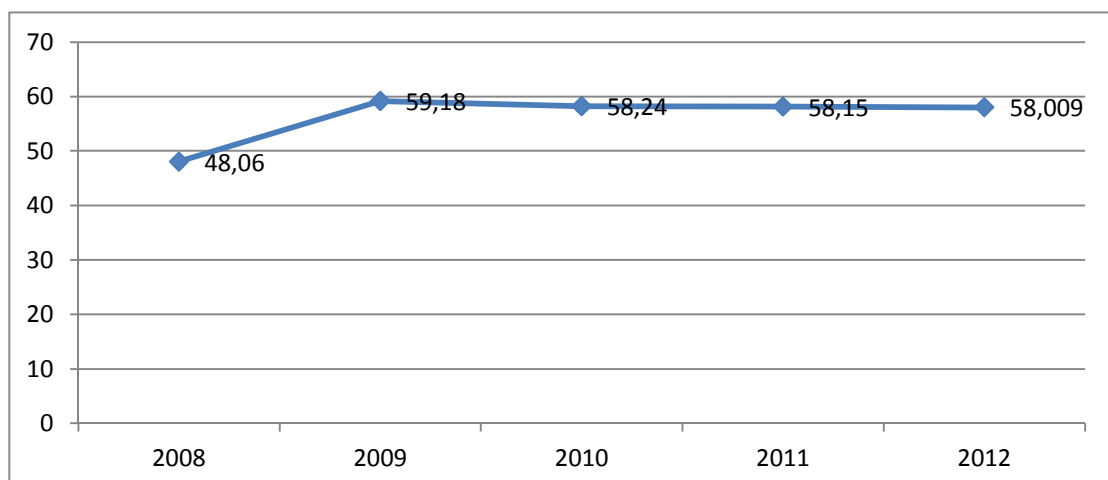
2.4.4. FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

2.4.4.1. Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pension, penduduk usia 15 – 64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk tidak produktif lagi disamping membiayai dirinya sendiri. Berikut ini perkembangan rasio ketergantungan penduduk 2008-2012

GRAFIK 2.11
RASIO KETERGANTUNGAN DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008-2012



Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Rasio ketergantungan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2012 58,09%, ini berarti setiap 100 orang produktif menanggung 58 orang tidak produktif, rasio ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2011 sebesar 58,15%.